

No. Reg: 191170000017435

LAPORAN PENELITIAN



**PENDIDIKAN KEULAMAAN PEREMPUAN  
PADA DAYAH MANYANG (MA`HAD ALY) DI ACEH**

Diajukan Oleh :

**Muhibuddin, M.Ag (Ketua)**

**NIDN: 2008067001**

**ID Peneliti : 2200806700108143**

**Fatimahsyam, SE., M.Si (Anggota)**

**NIDN: 0113127201**

**ID Peneliti : 1171085312720001**

<b>KATEGORI PENELITIAN</b>	<b>PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI</b>
<b>BIDANG ILMU KAJIAN</b>	<b>SOSIOLOGI PENDIDIKAN/GENDER</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Pendidikan Keulamaan Perempuan Pada Dayah Manyang (Ma'had 'Aly) di Aceh
- b. Kategori Penelitian : Pengembangan Pendidikan Tinggi
- c. No. Registrasi : 191170000017435
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosiologi Pendidikan/Kajian Gender
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Muhibuddin, M.Ag
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 197006082000031002
  - d. NIDN : 2008067001
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 2200806700108143
  - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Sains dan Teknologi/Teknik Lingkungan
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Fatimahsyam, SE., M.Si
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi Agama
  - j. Anggota Peneliti 2<sup>(Jika Ada)</sup>
    - Nama Lengkap :
    - Jenis Kelamin :
    - Fakultas/Prodi :
  
3. Lokasi Penelitian : Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 17 Oktober 2019  
Peneliti,

dto,

**Muhibuddin, M.Ag**  
NIDN. 2008067001

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhibuddin, M.Ag**  
NIDN : 2008067001  
NIPN (ID Peneliti) : 2200806700108143  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti/Pengusul  
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Teknik Lingkungan  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Bidang Ilmu : Metodologi Studi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

### **Pendidikan Keulamaan Perempuan Pada Dayah Manyang (Ma'had `Aly) di Aceh**

yang diusulkan dalam skema penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi ke Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk tahun anggaran 2019 bersifat orisinal dan belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh lembaga/ sumber dana lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Pengusul,



Meterai  
Rp.6000

**Muhibuddin, M.Ag**  
NIDN. 2008067001

## ABSTRAK

Saat ini, peran profetik keulamaan memiliki tanggung-jawab besar untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan memenuhi hak-hak sosial mereka, serta mengokohkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, segala upaya kultural dan struktural diperlukan dalam rangka menegaskan kerja-kerja sosial keulamaan untuk hak-hak perempuan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, sekaligus dalam rangka mereclaim keberadaan dan fungsi ulama perempuan dalam kancah sosial Indonesia dan dunia. Pendidikan keulamaan perempuan merupakan salah satu bentuk dari gerakan kulturisasi melalui proses pendidikan yang humanitarian dan dari bias gender. Pendidikan juga merupakan salah satu hak sosial kaum perempuan dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memadai baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pendidikan keulamaan merupakan salah satu kualifikasi pendidikan khusus keagamaan (Islam) yang berupaya memposisikan kaum perempuan pada taraf yang sejajar dengan dengan kaum laki-laki dalam kapasitas keulamaan yang mumpuni. Dayah Manyang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang berbasis masyarakat (didirikan dan dikelola oleh masyarakat) hingga saat ini masih eksis dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menelorkan para ulama muda baik laki-laki maupun perempuan. Namun kaum masih harus berjuang untuk memperoleh haknya ini. Sebab tantangan yang dialami oleh mereka jauh lebih kompleks dibandingkan dengan lawan jenisnya. Tantangan dimaksud adalah tantangan kultural dan struktural sekaligus. Dus, hingga kini dayah masih didominasi santri laki-laki dan santri yang berhasil mengenyam pendidikan keulamaan di dayah hingga sampai eksis di jenjang “finalis” sebagian besarnya santri laki-laki. Karena itu pendidikan keulamaan perempuan harus didorong sedemikian rupa oleh kesadaran kaum perempuan sendiri sehingga ulama perempuan tampil sebagai sebuah kenyataan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah--Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pendidikan Keulamaan Perempuan Pada Dayah Manyang (Ma’had ‘Aly) di Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Pimpinan Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara
5. Pimpinan Dayah Malikul Shalih Tanah Luas Pantonlabu Aceh Utara
6. Pimpinan Dayah MUDI Mesra Al-Aziziyah Bireun
7. Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Abu Kuta Krueng Pidie Jaya
8. dan Para Reviewr, tim dosen peneliti serta mahasiswa yang terlibat.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019  
Ketua Peneliti,

**Muhibuddin, M.Ag**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Manfaat/Kontribusi .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	14
B. Dayah Manyang; Pendidikan Tinggi di Pesantren	17
C. Kontruksi Gender di Dayah.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sumber Data .....	37
C. Instrumen Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis data.....	39
F. Lokasi Lapangan Penelitian.....	40
G. Personil Penelitian .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan Penelitian.....	62
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>A. Dayah MUDI Mesra Samalanga</b>	
1. Wawancara dengan dosen Ma'had 'Aly .....	1
2. Wawancara dengan Mahasantri Ma'had 'Aly .....	2
3. Wawancara dengan salah seorang Tengku.....	2
4. Wawancara dengan mahasantri .....	2
5. Distingsi Ma'had 'Aly MUDI Mesra.....	3
6. Miniatur Ma'had 'Aly MUDI Mesra .....	3
7. Balai tempat belajar mahasantri Ma'had 'Aly MUDI Mesra....	4
8. Lokasi depan kampus Ma'had 'Aly MUDI Mesra.....	4
9. kegiatan kaderisasi yang dilakukan mahasantri Ma'had 'Aly...	5
10. Koperasi dan toko kelontong.....	5
11. Usaha mandiri foto copy dayah MUDI Mesra.....	6
12. Lokasi pemeliharaan burung walet .....	6
13. Aktivitas ekonomi warga di lingkungan Ma'had Aly.....	6
14. Kampus Institut Agama Islam Al-Aziziyah.....	7
15. Asraman Mahasantri IAI al-Aziziyah.....	7
<b>B. Dayah Babussalam al-Hanafy</b>	
1. Spanduk informasi tentang Ma'had 'Aly Dayah Babussalam..	1
2. Bersama pimpinan Ma'had 'Aly Tgk. H. Sirajuddin al-Hanafy	1
3. Aktivitas santri perempuan di Ma'had 'Aly Dayah Babussalam	2
4. Aktivitas santri laki-laki Ma'had 'Aly Dayah Babussalam	3
5. Gedung utama Ma'had 'Aly Dayah Babussalam	3
<b>C. Dayah Malikul Shalih Tanah Luas Pantonlabu Aceh Utara</b>	
1. Jalan masuk utama ke komplek Dayah Malikul Shaleh	1
2. Spanduk informasi Ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih	1
3. Wawancara dengan pimpinan Ma'had 'Aly Malikul Shalih	2
4. Contoh referensi mahasantri di Ma'had 'Aly	2
5. Almarhum Tgk H Ibrahim Bardan (Abu Panton)	3
6. Ruang kuliah Ma'had 'Aly Malikul Shalih	3
7. Sarana kegiatan perkuliahan di Ma'had 'Aly Malikul Shalih	4
8. Gedung perpustakaan Ma'had 'Aly Malikul Shalih	4
9. Struktur kepengurusan Ma'had 'Aly Malikul Shalih	5
10. Ruang pimpinan Ma'had 'Aly Malikul Shalih	5
<b>D. Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng</b>	
1. Pimpinan muda (gurei) Ma'had 'Aly Darul Munawarah	1
2. Kantor Utama Ma'had 'Aly Darul Munawarah	1
3. Kantor Mudir Ma'had 'Aly Darul Munawarah	2
4. Tgk H. Anwar Usman Mudir Ma'had 'Aly Darul Munawarah	2
5. Ulama Kharismatik Aceh, Tgk.H. Usman (Abu Kuta Krueng)	3

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had 'Aly
2. Kurikulum Ma'had 'Aly Malikul Shalih
3. Sejarah dan Profil Dayah Babussalam al-Hanafiyah
4. Nota penyerahan produk penelitian
5. SPTJB penelitian
6. Surat pernyataan penyerahan outcome
7. Surat pernyataan ciptaan

## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam telah mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap peradaban ilmu pengetahuan. Namun, dalam lembaran-lembaran sejarah tidak banyak ditampakkan sebagaimana popularitas ulama laki-laki. Sebut saja, misalnya, istri Nabi Muhammad SAW, *Sayyidatina* 'Aisyah ra, yang meriwayatkan ribuan hadits. Beliau dipercaya Nabi SAW sebagai ahli ilmu agama, sehingga Nabi memerintahkan para sahabat menimba ilmu dari Aisyah ra. Ada juga nama Rabi'ah al-Adawiyah, Sang Guru Sufi dari Bashrah, *Sayyidatina* Sukainah, cucu *Sayyidina* Ali ra, dikenal sebagai perempuan yang luas ilmunya. Masih banyak lagi sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut-tabiin* perempuan yang diakui keulamaannya oleh ulama laki-laki dan masyarakat luas, sehingga namanya tercantum dalam kita-kitab *tarajim* (biografi). Sudah menjadi fakta sejarah bahwa para ulama laki-laki juga berguru kepada ulama perempuan. Imam Syafi'i ra berguru kepada *Sayyidatina* Nafisah binti al-Hasan, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Ummu Ammar ats-Tsaqafiyah, Ibnu Khallikan berguru pada Zainab binti as-Syari. Bahkan, Imam as-Suyuthi belajar kepada lebih dari 33 guru perempuan, dan seperempat haditsnya diriwayatkan dari guru perempuan. As-Sakhawi juga belajar pada 46 guru perempuan. Syuhdah binti an-Nashr Ahmad (w. 1178 M) dikenal sebagai pengajar *Shahih Bukhari* terbaik pada masanya.

Di Indonesia, munculnya organisasi-organisasi perempuan di kalangan komunitas keagamaan, seperti Muslimat dan Fatayat di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Aisyiah dan Nasyyatul Aisyiyah di lingkungan Muhammadiyah maupun Persistri di lingkungan organisasi Persatuan Islam (Persis) juga merupakan respon dari adanya tuntutan agar perempuan mendapatkan ruang untuk ber-*tafaqquh fid-dien*, menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Begitupun organisasi-organisasi perempuan yang lain telah menjalankan tugas mulianya untuk melakukan penyadaran publik dan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatannya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Dalam konteks negara bangsa (*nation state*), ulama perempuan Indonesia dengan kerjasama yang baik dengan ulama dan aktivis laki-laki memainkan peranan signifikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Akhir-akhir ini, diskursus yang berkembang di masyarakat banyak memunculkan dikotomi-dikotomi yang mempertentangkan antara agama dan negara, kesalehan individual

dan kesalahan sosial, lokal dan global yang berpotensi memunculkan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perempuan seringkali menjadi kelompok orang yang sangat rentan kekerasan dan ketidak-adilan. Sekedar untuk menyebutkan beberapa contoh, hadirnya beragam bentuk kesalahan simbolik dan pembatasan di ruang publik dengan mengedepankan perempuan sebagai *ikon*-nya melalui beragam cara seperti aturan tentang cara berpakaian perempuan, jam malam, kriminalisasi korban kekerasan seksual baik di ranah publik maupun domestik, tes keperawanan, kekerasan atas nama agama yang banyak menysar perempuan miskin dan minoritas -etnis, pilihan ekspresi individu, agama dan aliran kepercayaan dan sebagainya- meniscayakan kehidupan bersama yang perlu ditata ulang.

Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan atas diskriminasi berlapis yang menimpa dirinya, atas dasar jenis kelamin ataupun beragam bentuk politik identitas lainnya. Situasi itu meniscayakan pentingnya diskusi dan kajian yang mendalam dan bersifat *cross-cutting* (saling beririsan) dengan isu-isu lain yang menghambat kebebasannya untuk berekspresi (mengungkapkan pikiran dan pendapat, dalam hal berkeyakinan, maupun dalam berperilaku sehari-hari). Saat ini, peran profetik keulamaan memiliki tanggung-jawab besar untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan memenuhi hak-hak sosial mereka, serta mengokohkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, segala upaya kultural dan struktural diperlukan dalam rangka menegaskan kerja-kerja sosial keulamaan untuk hak-hak perempuan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, sekaligus dalam rangka me-*reclaim* keberadaan dan fungsi ulama perempuan dalam kancah sosial Indonesia dan dunia.

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadis. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “alim” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu. Tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi ulama sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Al-Qur’an menyebut kata “alim” (bentuk tunggal) sebanyak 13 kali (9: 105, 13: 9, 32: 6, 33: 92, 34: 3, 35: 38, 39: 46, 59: 22, 62: 8, 18: 64, dan 72: 26). Semuanya mengenai sifat Allah Swt, yang Maha Tahu dalam segala hal, baik yang terlihat maupun gaib. Sementara kata “ulama” sendiri hanya disebut sekali dalam Surat Fathir (35: 28). Ayat ini berbicara mengenai karakter dasar “ulama” yang harusnya berintegritas tinggi karena hanya takut pada Allah Swt. Kata lain yang masih dari akar yang sama adalah “ulul ilmi”, atau orang yang berilmu. Yaitu

dalam surat Ali Imran (3: 18), mengenai tugas utama ulama untuk menegakkan keadilan. Al-Qur'an juga menyebut beberapa kata lain yang memiliki konotasi yang sama dengan ulul 'ilmi. Yakni "ulul Abshar" (Q.S. al-Hasyr, 59: 2), "ulil al-Albab" (Q.S. Ali Imran, 3: 191), "Ahl al-Dzikir" (Q.s. al-Nahl, 16: 43), dan lain-lain. Dalam Hadits, kata "ulama" secara tekstual disebut sebagai pewaris para Nabi (Sunan Abu Dawud, no. Hadits: 3643). Dengan tugas utama membimbing umat ke jalan yang benar, "ulama" dikontraskan dengan "*juhhal*", atau mereka yang bodoh, sesat dan menyesatkan (Sahih Bukhari, no. Hadits: 100). Baik al-Qur'an maupun Hadis, kata "ulama" lebih menekankan pada perilaku daripada jenis ilmu yang harus dikuasai mereka.

Berangkat dari sumber-sumber teks di atas, dapat dipahami bahwa "ulama" adalah orang yang berilmu mendalam, yang dengannya memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlaq karimah), mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Definisi di atas terinspirasi dari pernyataan Habib Abdullah al-Haddad (w. 1132 H/1720 M) dalam al-Nashaih al-Diniyah, bahwa ilmu seorang ulama itu harus mengantarkannya pada semua perilaku mulia (*akhlaq mahmudah*) dan perbuatan baik yang bermanfaat (*a'mal shalihah*). Yang dimaksud ilmu mendalam di sini, merujuk pada pembahasan ijtihad oleh asy-Syatibi (w. 7983 H/1388 M) dalam al-Muwafaqat, adalah ilmu tentang teks-teks agama (*an-nushush asy-syar'iyyah*), prinsip dan cita-cita dasar hukum agama (maqashid asy-syar'iyyah), dan realitas sosial yang dihadapi (*waqa'i al-hayat*).

Kata "perempuan", dapat dipahami memiliki dua pemaknaan, biologis dan idiologis. Pemaknaan dari sisi biologis, seperti yang didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Secara idiologis, perempuan di sini bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini digunakan untuk membedakan kata "perempuan ulama" dari "ulama perempuan". Yang pertama adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Sementara yang kedua adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Ulama perempuan bekerja, secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemaknaan “Ulama Perempuan” ini menyiratkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menegaskan dan memastikan, bahwa kiprah ulama, dengan ilmu yang dimilikinya, adalah untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subyek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Dalam proses panjang ini, identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan ulama sejak masa awal Islam sampai saat sekarang ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan.

Pada akhir proses panjang ini, harapannya, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlaq karimah), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil ‘alamin*). Takut atau takwa kepada Allah Swt tidak hanya untuk urusan laki-laki tetapi juga untuk urusan perempuan. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan dan Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami. Berdasarkan amanat Undang-undang di atas, Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan secara otonom.

Dayah adalah lembaga pendidikan pondok pesantren, dalam bentuk salafiyah, modern, dan Dayah Manyang atau Ma’had `Aly. Sejarah masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dengan dunia Pendidikan Dayah yang sangat mangakar dan manyatu dalam kehidupannya. Menuntut ilmu di dayah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam tipikal masyarakat tradisional Aceh. Bagi masyarakat Aceh untuk mendalami ilmu-ilmu

agama, dayah sebagai lembaga pendidikan menjadi pilihan masyarakat tradisional Aceh. Dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka ada yang mampu menjadi raja, menteri, panglima militer, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, kedokteran dan lain-lain.

Jalur pendidikan dayah di Aceh adalah pendidikan formal yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah Aceh, yayasan, badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pendidikan formal di dayah dapat dilakukan dengan tatap muka. Tahapan dalam pendidikan dayah dilaksanakan secara bertingkat dan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan thalabah/santri. Tingkat Pendidikan Dayah terdiri atas Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Ma'had Aly (*Dayah Manyang*). Pendidikan 'Ma'had Aly merupakan pendidikan dayah yang masa belajarnya empat tahun setelah pendidikan Aliyah. Pendidikan Ma'had Aly bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan Thalabah/santri yang islami, mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab serta mengamalkan al-Quran untuk melanjutkan ke tingkat Pendidikan Strata (S2) atau untuk memasuki pasar kerja. Lulusan Ma'had Aly harus mampu menghafal minimal 4 (empat) juz Aliyah serta mampu membaca dan memahami isi kitab mahalli dan/atau yang sederajat. Pendidikan Ma'had Aly berhak mengeluarkan ijazah Ma'had Aly oleh dayah yang bersangkutan.

Kurikulum Ma'had Aly (*Dayah Manyang*) memuat mata pelajaran: a. Hifdhil Qur'an : Hafal 15 juz dengan tajwid yang bagus; b. Fiqh : Fiqh thuhfah ibnu hajar al-haitami; c. Ulumul Hadits : Disesuaikan; d. Ulumul Qur'an; e. Usul Fiqh; f. Fiqh Sunnah; g. Fiqh al-Muqaran : Milal Wanihl Lisyarastani; h. Maqaashid Syari'ah : Muwafaqat; i. Fiqh al-Syafi'e; j. Tafsir Ayat Al Ahkam; k. Hadits Ahkam; l. Akhlak; m. Sirah Nabawiyah : Sirah Husain Haikal; n. Fiqh hadisthah : fiqh islami wa-adillatuhu (wahbah zuhaily) o. Sejarah Perundangan Islam; p. Bahasa Arab; q. Bahasa Inggris; r. Tamadun Islam; s. Qawaid Fiqhiyyah; t. Ilmu Manajemen; u. Ahwal Syakhsiah; v. Tauhid; w. Dakwah Islamiyah; x. Ilmu Astronomi; y. Metode Penelitian; z. Ilmu Pengetahuan Alam; â. Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun mata pelajaran umum disesuaikan dengan Kurikulum Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).

Pemerintah Aceh pada tahun 2012 sudah menetapkan delapan Dayah Manyang (*Ma'had Ali*) atau pesantren setingkat perguruan tinggi di beberapa daerah di Aceh. Diharapkan program pendidikan tinggi yang eksis di lembaga pendidikan dayah terus meningkat kualitasnya. Adapun sistem pendidikan Dayah Manyang sama dengan perguruan tinggi, dimana lulusannya bisa melanjutkan studi ke jenjang S2 ke universitas negeri karena

ijazahnya sudah diakui. Hingga sekarang ini, terdapat delapan dayah di daerah Serambi Makkah ini sedang melangsungkan pendidikan Dayah Manyang. Dayah-dayah yang mulai melaksanakan program dayah manyang tersebut masing-masing; Darul Munawarah Kuta Krueng (Pidie Jaya), Dayah Mudi Mesra Samalanga (Bireuen), Dayah Malikussaleh Panton Labu (Aceh Utara), Dayah Darussalam Labuhan Haji (Abdya), Dayah Babussalam Meulaboh (Aceh Barat), dan Dayah Al Falah Abu Lam U (Aceh Besar). Dayah Manyang, diharapkan akan mampu menghasilkan para ulama setingkat strata 1 (S-1) sehingga mereka bisa menjadi tenaga pengajar dan dai di berbagai dayah lainnya. Peranan dayah di Aceh sebenarnya sangat strategis. Hanya saja, keberadaan lembaga pendidikan agama tersebut selama ini sering mengalami pasang surut. Saat ini, dayah sedang dihadapkan pada tantangan besar, terutama menyangkut masalah administrasi yang belum tertata baik, pengelolaan manajemen yang kurang profesional, dan masalah penguasaan teknologi informasi yang masih harus terus ditingkatkan.

Dalam proses kultural ini, sebuah penelitian serius yang mampu memetakan basis-basis atau kantong-kantong berupa lembaga pendidikan keagamaan tradisional selevel dayah (pesantren) yang di dalamnya mendidik dan menyiapkan ulama perempuan amatlah penting. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencermati dan mengafirmasi peran kultural masyarakat dalam melahirkan perempuan-perempuan ulama di Indonesia, terutama mereka yang sudah memiliki kesadaran keberpihakan untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini akan melibatkan para pemimpin, pengasuh dan pengelola pondok pesantren (dayah), santri perempuan, aktivis, pakar, pemerhati, dan akademisi yang peduli pada isu keislaman dan keadilan gender dari sejumlah dayah di Aceh untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait kiprah keulamaan perempuan. Dus, melalui penelitian ini, dayah yang memihak pada pengkaderan ulama perempuan diharapkan menjadi *pilot project* bagi para peneliti dan pemerhati pendidikan para perempuan ulama dan ulama perempuan yang menghasilkan tawaran solusi bagi problem-problem aktual terkait keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses berlangsungnya pendidikan pada Ma`had Aly (*Dayah Manyang*) selama ini.
2. Untuk mencermati pandangan pimpinan dan tenaga pendidik pada program Ma`had Aly (*dayah manyang*) terhadap keulamaan perempuan di dayah.

3. Untuk menemukan ragam bentuk peluang dan tantangan yang dialami oleh ulama dayah dalam proses pendidikan keulamaan perempuan di dayah.

### **C. Rumusan Masalah**

Jika menggunakan analisis Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa terdapat tiga fungsi utama lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren ataupun dayah. *Pertama*, transmisi atau transfer ilmu-ilmu keislaman; *kedua*, pemeliharaan tradisi keislaman; dan *ketiga*, regenerasi ulama. Nampaknya, pada poin ketiga inilah stressing penelitian ini, yaitu pada regenerasi keulamaan perempuan. Jika ditanya ada apa atau mengapa dayah salafiyah, maka jawabannya adalah karena masih ada anggapan masyarakat luas bahwa di dayah salafiyah ini peluang lahirnya keulamaan perempuan mengalami tantangan yang berarti bila dibandingkan dengan lembaga dayah modern. Karena itu untuk menjawab permasalahan tentang dayah di Aceh sebagai lembaga pendidikan alternatif dan kaitannya dengan keberlanjutan regenerasi ulama perempuan di dalamnya dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah proses berlangsungnya pendidikan pada Ma`had Aly (*dayah manyang*) selama ini.
2. Bagaimanakah pandangan pimpinan dan tenaga pendidik pada program Ma`had Aly (*dayah manyang*) terhadap keulamaan perempuan di dayah.
3. Apa sajakah ragam bentuk peluang dan tantangan yang dialami oleh ulama dayah dalam proses pendidikan keulamaan perempuan di dayah.

### **D. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang kaum perempuan dalam perspektif gender selalu menarik perhatian para peneliti dan pemerhati kajian gender khususnya. Penelitian jenis ini telah banyak dilakukan oleh sejumlah pihak baik secara perorangan maupun di bawah satu lembaga riset. Sementara kajian kepustakaan lainnya adalah berkenaan dengan ulama dan lembaga pendidikan dayah yang diurusnya. Penelitian tentang lembaga dayah dan ulama yang dihasilkannya telah banyak menarik perhatian sejumlah ahli. Dalam lingkup penelitian di Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya, paling tidak telah menghasilkan puluhan karya. Penelitian mengenai *dayah* di Aceh umumnya diteliti oleh berbagai-bagai pakar, baik dalam maupun luar negeri. Kendati buku-buku yang dikarang tidak secara khusus membahas tentang *dayah salafi*, namun sebagian besar peneliti telah memasukkan *dayah* sebagai sub-sub bahasan dalam penelitian mereka, termasuk laporan-laporan penelitian, jurnal ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya seperti tesis M. Hasbi Amiruddin (1997) di Program Graduate (S2) McGill University Canada, *The Response of the Ulama Dayah to The Modernization of*

*Islamic Law In Aceh*.<sup>1</sup> Tesis tersebut membahas tentang perkembangan pandangan ulama *dayah salafi* terhadap modernisasi hukum Islam di Aceh. Sebelumnya A. Hasyimy (1981) dengan bukunya *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*,<sup>2</sup> banyak membicarakan tentang perkembangan kebudayaan Islam Aceh, termasuk di dalamnya sub pembahasan yang menyebutkan tentang Institusi-Institusi pendidikan *dayah salafi* yang ada di Aceh.

M. Isa Sulaiman (1986) dalam bukunya, “*Sejarah, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*”, menjelaskan tentang perjalanan rakyat Aceh serta peranan ulama tradisional dengan Institusi pendidikannya seperti *dayah* dalam kehidupan sosial masyarakat. Safwan Idris (1998)<sup>3</sup> dalam tulisannya, “*Tokoh-tokoh Nasional, Overseas Education and The Evolution of The Indonesian Elite*”, salah satu sub bahagiannya membahas tentang tradisi menetap di asrama (bahasa Aceh = *meudagang*) para pelajar dalam melanjutkan pendidikan antara satu *dayah* ke *dayah* lainnya.

Selanjutnya Sulaiman Djalil (1980) mengadakan penelitian dengan topik “*Fluktuasi Pendidikan di Aceh*”, yang membahas perkembangan pendidikan di Aceh termasuk *dayah*, madrasah dan sekolah. Namun penelitian tersebut menafikan permasalahan proses belajar di *dayah* terutama penggunaan kaedah pengajaran. Baihaqy AK (1985)<sup>4</sup> pernah melakukan penelitian mengenai “*Ulama dan Madrasah di Aceh*” yang kemudian diterbitkan oleh Rajawali Press dengan judul *Agama dan Perubahan Sosial*, membahas peranan ulama pada masa silam, namun bahasannya tidak juga mencakup tentang sistem pendidikan di *dayah*. Kemudian Kustadi Suhandang (1985) bersama rakan-rakannya juga pernah mengadakan penelitian dengan topik “*Studi Tentang Dayah di Daerah Istimewa Aceh*”, tapi pembahasannya sangat deskriptif dan tinjauannya lebih banyak pada perkembangan pendidikan sahaja tanpa melihat bagaimana proses belajar di *dayah* tersebut.

Arbiyah Lubis (1999) dengan tajuk “*Ulama Dayah - Studi Tentang Kualitas Ulama Dayah Masa Silam dengan Masa Kontemporer*”, yang membahas peran ulama masa silam dan sekarang yang berasal dari alumni *dayah*, dimana masa silam ulama *dayah* sangat berperanan dan berkualiti berbanding ulama *dayah* masa kini. Tidak banyak kajian atau penulisan dibuat tentang kurikulum atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di *dayah* di dalam membangunkan ilmuan Islam.

---

<sup>1</sup>M. Hasbi Amiruddin, *The Response of the Ulama Dayah To The Modernization of Islamic Law In Aceh*. Tesis Master Mc.Gill. Kanada, 1994.

<sup>2</sup>Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

<sup>3</sup>Safwan Idris, *Refleksi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Aceh, Peta Pendidikan Dahulu dan Sekarang*, Jurnal Ar-Raniry, No. 73, 1998.

<sup>4</sup>Baihaqy AK., ” *Ulama dan Madrasah Aceh*”, dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali 1983.

Dalam karyanya yang lain, Safwan Idris pernah juga meneliti tentang *Perkembangan Pendidikan Dayah; Antara Tradisi dan Pembaharuan di Daerah Istimewa Aceh* (1999). Dalam karya ini Safwan bahwa pendidikan paling orisonal di Aceh adalah pendidikan dayah. Dalam perkembangannya, dayah telah banyak mencetak para ulama baik dalam sistemnya yang tradisional (salafi) maupun modern. Sri Suyanta dalam karyanya *Peran Ulama Acej Era Reformasi* (2001) mencoba memotret ulama Aceh pada fase ini dengan mengatakan bahwa ulama sangat responsif dan memainkan perannya yang signifikan terhadap perkembangan situasional tertentu di lingkungannya.

Muhtarom HM, *Reproduksi Ulama di Era Global; Resistensi Tradisional Islam* (2004)<sup>5</sup> menyimpulkan bahwa modernisasi kelembagaan pesantren tidak berpengaruh banyak terhadap semangat dasar pendidikan di pesantren, yaitu *yatafaqqahu fi al-din* dan spirit tradisionalisme Islam yang begitu mengakar. Azhar M. Nur, *Modernisasi Kurikulum Dayah di Aceh* (2011)<sup>6</sup> menyimpulkan bahwa restrukturisasi kurikulum pembelajaran di dayah merupakan keharusan untuk memodernisasikan dayah. Fachri Yacob dan kawan-kawan, *Reproduksi Ulama Perempuan Pada Dayah di Aceh* (2010)<sup>7</sup> menemukan bahwa dayah dalam sistem tradisionalnya minim melahirkan ulama perempuan. Ulama perempuan baru akan dihasilkan oleh dayah manakala lembaga dayah mendapatkan sentuhan modernisasi. Mukhlisuddin Ilyas dalam penelitiannya yang berjudul *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas* (2012)<sup>8</sup> menyatakan bahwa Pendidikan Dayah di Aceh mulai hilang identitas. Lembaga pendidikan Dayah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan agama di Aceh, kini sudah hilang identitas. Pendidikan Dayah yang secara historis dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat melalui pendekatan community Masjid Raya Banda Aceh Based, kini terkesan menjadi lembaga pendidikan elit sejak Pemprov Aceh mengeluarkan regulasi terhadap pendidikan di dayah. Dampak yang paling tragis dari intervensi tersebut terhadap proses pendidikan dayah adalah, hilangnya sikap sosial dari masyarakat sekitar untuk membantu eksistensi proses belajar mengajar di Dayah.

Selanjutnya Muhammad Abdurrahman dalam disertasi yang telah dibukukan dengan berjudul; "*Aktualisasi Nilai-Nilai Persaudaran Islam Model dayah Aceh*"<sup>9</sup> menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup>Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistansi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

<sup>6</sup>Azhar M. Nur, *Modernisasi Kurikulum Dayah di Aceh*, Jogyakarta: Lantera Press, 2011.

<sup>7</sup>Fachri Yacob dkk, *Reproduksi Ulama Perempuan Pada Dayah di Aceh*, Jakarta: Penelitian Kompetitif Kemenag RI-Pendis-Diktis, 2010.

<sup>8</sup>Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

<sup>9</sup>Muhammad Abdurrahman, *Aktualisasi Nilai-Nilai Persaudaran Islam Model dayah Aceh*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.

dayah pada zaman berdirinya merupakan lembaga pendidikan formal Islam tradisional yang indigenius Nusantara. Dayah telah eksis sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam bersamaan dengan kedatangan Islam pertama kali ke Indonesia melalui Samudera Pasai Aceh. Dayah merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran agama Islam yang intensif tentang berbagai kajian keislaman bagi anak dan remaja Muslim. Dayah juga berperan sebagai pusat internalisasi nilai-nilai keislaman seperti persaudaraan, silaturahmi, kasih sayang, penghormatan, kesetiaan, tanggungjawab, kedisiplinan, kerja keras, keikhlasan dan pengorbanan (jihad). Seiring dengan perubahan zaman, dayah terus berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan dayah ke dalam sistem pendidikan nasional. Kendati demikian, dayah di Aceh telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelbagai program pemerintah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah Aceh telah menaruh perhatian yang sama besar terhadap lembaga pendidikan Islam ini seperti halnya lembaga pendidikan formal. Pemerintah menganggap bahwa eksistensi dayah sangat strategis dalam pembinaan akhlak dan moral anak bangsa terutama dalam menghadapi tantangan global dewasa ini.

Sementara itu, Mulyadi Kurdi<sup>10</sup> dalam buku "*Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resourch di Aceh*" menyebutkan bahwa hubungan antara ulama dayah dengan pemerintah sejak zaman kesultanan Aceh (era Sultan Iskandar Muda) hingga sekarang (masa Pemerintah Aceh) terjalin dengan akrab dan kooperatif. Kontribusi ulama sebagai penasehat umara (pemimpin) dalam setiap pengambilan keputusan penting yang menyangku hajat hidup rakyat banyak. Bahkan stabilitas pemerintahan sangat ditentukan sejauhmana hubungan umara dengan ulama berlangsung. Kontribusi dan andil ulama dalam pemerintahan telah memberikan banyak penyelesaian masalah politik dan juga agama. Karena itu ulama mendapat posisi yang menggembirakan dalam kerajaan Islam Samudera Pasai, misalnya. Ulama berperan aktif sebagai penasehat hukum istana, di samping menjadi penyuluh agama bagi masyarakat luas. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri peranan ulama di Aceh, baik di era kerajaan, pra-kemerdekaan, era kemerdekaan hingga dewasa inipun masih begitu besar dalam menengahi berbagai persoalan umat.

Huwaida dalam bagian tulisan hasil penelitian tesis Ph.D pada Flinders University South Australia yang berjudul "*Change and Development in The Acehnese Dayah Salafi (a*

---

<sup>10</sup>Mulyadi Kurdi (editor), *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resourch di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.

*Case Study*),<sup>11</sup> melakukan studi tentang dayah salafi di Aceh dalam konteks perubahan dan perkembangan mutakhir, berkenaan dengan standarisasi dan regulasi dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kasus kualitatif dari dayah salafi yang dipilih di provinsi Aceh. Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana standarisasi atau pengaturan yang mungkin mempengaruhi aktivitas dan pengajaran di dayah salafi. Penelitian ini dilakukan pada dayah salafi di Aceh, dimana dayah merupakan lembaga pendidikan yang kompleks. Meskipun demikian, dayah salafi adalah salah satu dari berbagai lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad di Indonesia sebagaimana penelitian Dhofier. Dayah sebenarnya tidak stagnan, melainkan sebuah lembaga pendidikan yang dinamis. Dinamisme dayah terbukti melalui pengembangan dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Dimana ulama dayah sangat menyadari bahwa dunia berubah dan, karena itu, mereka selalu berpikir tentang pengembangan dengan tujuan yang telah mereka tujukan.

Peneliti sendiri dalam beberapa kesempatan telah melakukan sejumlah riset tentang tema ini. Diantara kajian dimaksud adalah penelitian yang berjudul; *Mencari jejak Ulama Perempuan Pada Lembaga Pesantren Tradisional (Dayah) di Aceh*.<sup>12</sup> Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ulama, persepsi yang terbangun dalam masyarakat adalah sosok laki-laki yang berpengetahuan agama hasil tempaan lembaga pendidikan Islam tradisional dan memiliki karisma (panutan) dalam masyarakat. Padahal, kualifikasi keulamaan memungkinkan pada siapapun, tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ulama. Tetapi dalam realitas sosial hal ini tidak mudah diwujudkan. Berbagai faktor, di antaranya sosio-kultural turut menghambat kaum perempuan berhasil menobatkan dirinya sebagai ulama layaknya kaum laki-laki. Kendati laki-laki dan perempuan sama-sama dilahirkan dari kombinasi yang serasi antara lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kurang polulernya ulama perempuan boleh jadi disebabkan oleh faktor bias gender yang masih kuat dalam masyarakat. Padahal, secara kuantitas kaum perempuan telah memperoleh akses pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Tetapi, mengapa kaum perempuan masih relatif terbatas yang mencapai derajat keulamaan.

---

<sup>11</sup>Huwaida, *Change and Development in The Acehnese Dayah Salafi (a Case Study)*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal*, Published: May 25, 2015, alamat: <http://www.scadindependent.org>. Huwaida is a Lecturer at Faculty Adab and Humaniora UIN Ar-Raniry, Completed her Ph.D degree at Flinders University, South Australia.

<sup>12</sup> Muhibuddin dkk, *Penelitian Bantuan Penelitian Kompetitif Kolektif Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*, 2012.

Di Indonesia, pesantren mempunyai peranan penting dalam upaya mewarisi dan mengembangkan warisan intelektual dan spiritual.<sup>13</sup> Hal ini bisa dipahami, karena dilihat dari latar belakangnya, pesantren berperan sebagai lembaga transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pesantren berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan nilai-nilai agama melalui pendidikan, kegiatan masyarakat dan praktek ritual. Karena tradisi keilmuan di pesantren ataupun dayah mengalami dinamika tersendiri yang unik. Akan tetapi sebagaimana disinggung di atas, dayah atau pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tetap saja menyisakan satu persoalan besar, terutama berkenaan dengan *gender equality* khususnya dalam menjalankan fungsi keilmuannya untuk mendidik calon ulama perempuan.

Posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya adalah bahwa jika penelitian sebelumnya baru sekedar memetakan masalah di sekitar kaum perempuan dari satu sudut dan posisi ulama dari sudut yang berbeda menurut perspektif masing-masing, maka penelitian kali ini mencoba menyatukan keduanya dalam satu mindset yang "sekufu". Dimana kaum perempuan sebagai calon ulama baru harus berada di "sarangnya" ulama yang didominasi kaum laki-laki. Mungkin juga di tempat ini (dayah) yang notabene kental dengan auranya kaum laki-laki, para perempuan calon ulama itu akan merasa sebagai bagian dari pedopokannya juga. Beranjak dari persoalan inilah penelitian ini penting dilakukan guna memberi gambaran yang lebih jelas dan objektif terhadap proses pendidikan calon ulama perempuan pada lembaga dayah di Aceh pada era modern ini. Konon lagi menyangkut masalah pemerataan kesempatan serta penegakan keadilan atau keseimbangan kesempatan antara anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi calon ulama.

#### **E. Manfaat/Kontribusi Penelitian**

Secara lebih spesifik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tepat, efektif dan maksimal terhadap perubahan paradigma berfikir baik dari kalangan perempuan calon ulama maupun para ulama pengurus dan pengajar di dayah terhadap pengarusutamaan gender. Perubahan mindset tersebut diharapkan juga muncul pada stakeholder lainnya, terutama akademisi dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam rangka menempatkan perempuan pada posisi yang lebih layak, bermartabat dan terhormat. Dan secara umum, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat Islam Indonesia pada umumnya dan pemerintah Indonesia khususnya dalam melihat dan mencermati keterdesakan posisi kaum perempuan sebagai warga negara yang

---

<sup>13</sup>Jamal D Rahman, "Distorsi Khazanah Kultural Pesantren", dalam A. Naufal Ramzy (ed), *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Jakarta: Deviri Ganan, 1993, hal. 125.

harus dilindungi dan diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan hak-hak dasarnya sebagai manusia dan elemen bangsa.

Singkatnya, beberapa kontribusi yang dapat disumbangkan dari penelitian ini dapat disederhanakan sebagai berikut;

1. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan berupa penambahan atau pembaruan data untuk mendukung teori yang telah ada.
2. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat memetakan perubahan sosial keagamaan di lembaga pendidikan dayah tradisional dengan ulama dan santri sebagai agen perubah.
3. Secara sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia melalui temuan dan rekomendasi penelitian.

## BAB DUA

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perguruan tinggi bukan saja menjadi sarana transformasi pengetahuan tetapi juga menjadi dinamisator masyarakat. Perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar dari Banda Aceh sampai ke Jayapura sekaligus menjadi sarana pengembangan masyarakat. Pelbagai bentuk program yang dijalankan dalam rangka menunjukkan bentuk lebih teknis dari moderasi Islam. Pengembangan keilmuan termasuk pembukaan jurusan-jurusan yang variatif memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar ilmu secara teknis.

Pendidikan tinggi keagamaan justru menjadi wadah pengembangan keagamaan.<sup>1</sup> Bahkan Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah internasional, Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memberikan tawaran solusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan.<sup>2</sup>

Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) secara kuantitatif mengalami peningkatan. Bahkan terakhir sudah dilantik rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Ini menjadi PTKI ke-60. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Ada tiga jenis perguruan tinggi yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu universitas Islam negeri (UIN), institut agama Islam negeri (IAIN), dan sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN). Berdasarkan data pada tahun 2019, saat ini PTKI berjumlah 58 yang terdiri dari 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN. Kecuali Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, semuanya sudah terdapat perguruan tinggi keagamaan Islam. Adapun Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus swasta (PTAIS), tercatat sebanyak 461 Institusi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Keberadaan PTKI mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan masyarakat muslim Indonesia. Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai lembaga pendidikan

---

<sup>1</sup>Mulyono, M., & Wekke, I. S. *Academic and Culture Development Strategy Management for Islamic Higher Education In Indonesian*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (Vol. 175, No. 1, p.012163). IOP Publishing, 2018.

<sup>2</sup>H. A. R. Tilaar, (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. IndonesiaTera, 1998.

tinggi yang diakui eksistensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mendukung pembangunan di Indonesia.<sup>3</sup> Berdasarkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP 60 Tahun 1999 dan misi Kementerian Agama, maka secara konstitusional tujuan Pendidikan Tinggi Islam antara lain; Pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu, teknologi, seni dan atau kebudayaan yang bernafaskan Islam. Kedua, Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Ketiga, Merumuskan, menyebarluaskan dan mendidikkan filosofi dan nilai-nilai agama Islam sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai parameter perilaku kehidupan, menjadi inspirator dan katalisator pembangunan, serta motivator terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang harmonis antar umat yang berbeda agama.

Peran PTKI di atas sejalan dengan “*World Declaration on Higher Education for the Twenty First Century: Vision and Action*” yang dikeluarkan oleh UNESCO. Isi deklarasi tersebut relevan dengan paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia. Salah satu isi deklarasi tersebut menyebutkan bahwa misi dan fungsi Perguruan Tinggi adalah membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional dan internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya.<sup>4</sup> Proses perubahan sosial (*social change*) di masyarakat yang dinamis, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Pada umumnya peran Perguruan Tinggi itu diharapkan tertuang dalam pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, yaitu : dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Melalui dharma pendidikan, Perguruan Tinggi Agama Islam diharapkan melakukan peran pencerdasan masyarakat dan transmisi budaya. Sementara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui dharma Penelitian diharapkan melakukan temuan – temuan baru ilmu pengetahuan dan inovasi kebudayaan. Untuk membumikan dharma bakti ke masyarakat, Perguruan Tinggi keagamaan Islam diharapkan melakukan pelayanan masyarakat untuk ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan

---

<sup>3</sup> Daulay, H. P. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2014.

<sup>4</sup> Queiroz, L. R. S., & Figueiredo, S. “*The World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century*” and *Perspectives for Music Education in Brazil*. *International Perspectives on Research in Music Education*, 205, 2016.

kemajuan masyarakat. Melalui dharma pengabdian pada masyarakat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam juga akan memperoleh feedback dari masyarakat tentang tingkat kemajuan dan relevansi ilmu yang dikembangkan perguruan tinggi itu.

Peran PTKI juga bersifat multidimensi. PTKI dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam modus keagamaan masyarakat. PTKI ditantang untuk dapat mengembangkan teologi “*Unity in Diversity*”, sebagai landasan moralitas publik dalam kerangka Pancasila. PTKI hendaknya dapat mengambil peran penting dalam proses obyektivikasi nilai-nilai Pancasila ke dalam paradigma keilmuannya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan prinsip ketuhanan dalam teori-teori agama publik. PTKI hendaknya juga mengambil peran aktif dalam mengembangkan riset, edukasi dan pelayanan yang berkaitan dengan landasan spiritualitas dalam mendorong atos kerja yang positif. Lulusan PTKI dengan wawasan agama yang lebih luas dan mendalam, hendaknya bisa memberikan pupuk kesuburan di tengah kegersangan kehidupan etis dan welas asih di tengah – tengah kehidupan publik.<sup>5</sup>

PTKI di Indonesia terus berbenah, baik dari aspek kelembagaan maupun dari substansi disiplin kajian keilmuan; integrasi sains, teknologi dan keislaman. Transformasi lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari reposisi PTKI dari lembaga dakwah menjadi lembaga keilmuan yang profesional. Inilah sebenarnya masalah yang paling mendesak dirasakan pada periode awal berdirinya PTKI di Indonesia. Bahkan tradisi keilmiahannya harus terus dipacu. Karena dari segi kesejarahan, PTKI baru lahir tahun 1960-an. Sementara PTUN dan IKIP misalnya merupakan kelanjutan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang dikreasikan Belanda, jauh sebelum tahun 1960-an. PTKI adalah bukan lembaga dakwah. Pesantren lebih tepat sebagai lembaga dakwah. PTKI harus menghasilkan para pemikir Islam yang menyeluruh, sedangkan pesantren adalah tempat untuk *tafaqquh fiddin*. Dengan demikian ada pembagian kerja dalam lingkup kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Dimana masing-masing lembaga tersebut saling berbagi peran bagi kemaslahatan pencerdasan umat Islam di Indonesia. Tentu saja, sejak kelahirannya PTKI tidak langsung menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berciri akademis, dengan wawasan sosial politik yang luas.<sup>6</sup>

Pendidikan Islam yang diusung oleh PTKI adalah pendidikan yang secara komprehensif membentuk segenap potensi manusia berlandaskan pada paradigma keilmuan

---

<sup>5</sup> Fuaduddin, B. *Pendidikan Agama Islam, Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, editor Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (Vol. 2002). Jakarta: Logos, 2002.

<sup>6</sup> Fuad Jabali dan Jamhari (ed), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), hal. 94. Lihat juga, Abudin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal 31.

Islam. Karena itu tidak bisa dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu aspek ajaran Islam secara keseluruhan. Sehingga, tujuan pendidikan Islam--menurut Azyumardi Azra<sup>7</sup>--tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam ; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi, hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya. Sejalan dengan Azra, Zamakhsyari Dhofier berpandangan bahwa pendidikan merupakan sarana bagi pengembangan ajaran Islam, dan khususnya untuk mengembangkan kemampuan memahami inti ajaran Islam.<sup>8</sup> Di sisi lain, Nurcholish Madjid mengatakan, pendidikan Islam adalah pendidikan untuk pertumbuhan totalitas manusia. Pendidikan yang tujuan akhirnya menuju kepada penyempurnaan berbagai keluhuran budi. Karena itu, pendidikan budi pekerti menjadi aspek yang teramat penting dalam pendidikan Islam.<sup>9</sup> Dalam terma yang lebih universal, pembentukan akhlakul karimah dapat disebut dengan pembentukan karakter (*character building*).

#### **B. Dayah Manyang (Ma'had 'Aly); Pendidikan Tinggi di Pesantren**

Kehadiran pendidikan tinggi sekarang ini dirasakan cukup urgen dan mendesak, termasuk di lingkungan pesantren. Apalagi realitas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang, sehingga berpengaruh pada pola keberagamaan yang lebih rasional dan fungsional. Di samping itu, tuntutan masyarakat akan profesionalisme telah mengharuskan pesantren merespon secara lebih positif kebutuhan zaman tersebut. Dalam konteks ini, sistem pendidikan pesantren (tradisional) idealnya harus segera dipadukan dengan sistem pendidikan berbasis persekolahan (modern). Oleh karena itu, kehadiran Ma'had Aly sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam di lingkungan pesantren memiliki nilai tambah tersendiri bagi pengembangan tradisi ilmiah (akademik) di pesantren.

Ma'had Aly adalah perguruan tinggi yang berada di pondok pesantren dan khusus mempelajari ilmu agama Islam berbasis kitab kuning (karya ulama klasik/turats). Ma'had Aly adalah sebuah perguruan tinggi pesantren yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015. Hingga saat ini telah berdiri sebanyak 35 Ma'had Aly yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Ma'had Aly adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam. Pendidikan akademi di perguruan tinggi tersebut berbasis pada kitab kuning yang

---

<sup>7</sup>Azyumardi Azra, "Praktek Pendidikan Islam; Akselerasi Perkembangan dan tantangan Perubahan", dalam Kusmana dan JM Muslimin, *Paradigma Baru Pendidikan; Restropeksi dan proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IIES, 2008, hal. 64.

<sup>8</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1992, hal. 20.

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid, "Catatan Pengantar" dalam A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 3.

diselenggarakan pondok pesantren. Sebagai unsur PTKI, Ma'had Aly merupakan wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual pondok pesantren tingkat tinggi yang keberadaannya melekat pada pondok pesantren. Maka lulusan Ma'had Aly diharapkan menjadi kader kiai-ulama yang menguasai khazanah keilmuan *kutub at-turats* secara mendalam.

Dalam konteks Aceh, penyelenggaraan pendidikan dayah manyang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan dan Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami. Berdasarkan amanat Undang-undang di atas, Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan secara otonom.

Dayah adalah lembaga pendidikan pondok pesantren, dalam bentuk salafiyah, modern, dan dayah manyang atau ma'had aly. Sejarah masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dengan dunia Pendidikan Dayah yang sangat mangakar dan manyatu dalam kehidupannya. Menuntut ilmu di dayah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam tipikal masyarakat tradisional Aceh. Bagi masyarakat Aceh untuk mendalami ilmu-ilmu agama, dayah sebagai lembaga pendidikan menjadi pilihan masyarakat tradisional Aceh. Dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka ada yang mampu menjadi raja, menteri, panglima militer, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, kedokteran dan lain-lain.

Tingkat Pendidikan Dayah terdiri atas Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Ma'had Aly (*Dayah Manyang*). Pendidikan 'Ma'had Aly merupakan pendidikan dayah yang masa belajarnya empat tahun setelah pendidikan Aliyah. Pendidikan Ma'had Aly bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan Thalabah/santri yang islami, mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab serta mengamalkan al-Quran untuk melanjutkan ke tingkat Pendidikan Strata (S2) atau untuk memasuki pasar kerja. Lulusan Ma'had Aly harus mampu menghafal minimal 4 (empat) juz Aliyah serta mampu membaca dan memahami isi kitab mahalli dan/atau yang sederajat. Pendidikan Ma'had Aly berhak mengeluarkan ijazah Ma'had Aly oleh dayah yang bersangkutan.

Kurikulum Ma'had Aly memuat sejumlah mata pelajaran murni keagamaan seperti al-Qur'an wa ilmuha, fiqh dan ulumuha, hadits wa ilmuha, usul Fiqh wa ilmuha, akhlak dan

turunannya serta sirah nabawiyah. Demikian juga dengan ilmu alat (bahasa), seperti bahasa Arab dan turunannya, bahasa Inggris, tamadun Islam, ilmu Manajemen, tauhid, dakwah Islamiyah, ilmu astronomi, metode Penelitian, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).

Reformulasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan di lingkungan dayah telah direalisasi melalui program ma'had 'aly di bawah payung yuridis Permenag RI No. 7 tahun 2017. Pendidikan tinggi di lingkungan dayah dengan sendirinya akan membuka peluang dan tantangan tersendiri bagi munculnya pandangan yang adil gender secara prospektif di kalangan pimpinan dan ulama dayah guna mendorong tumbuhnya mindset keulamaan perempuan pada ma'had 'aly. Kedua variabel ini menurut hemat peneliti memiliki hubungan sebab akibat yang signifikan, apalagi dalam kancah wacana modernisasi lembaga pendidikan pesantren (dayah) di Indonesia sekarang ini. Selain itu penelitian ini juga akan mencermati perkembangan penyelenggaraan program pendidikan ma'had 'aly secara nasional.

Penelitian ini berangkat dari kerangka teori fungsional struktural (*fungsionalisme*) yang dikembangkan Robert Merton dan Talcott Parsons, namun kemudian dilihat dalam perspektif kajian gender, di mana setiap anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memainkan perannya menurut kapasitas masing-masing. Interaksi sosial diantara mereka terkadang berlangsung paralel dan tidak jarang juga timbul konflik. Relasi sosial semacam ini memungkinkan kedua jenis kelamin manusia ini melakukan bargaining yang memadai untuk saling menjaga harmonisasi dan sub-ordinasi sekaligus. Di samping itu juga pentingnya pemakaian kembali kata *ulama* yang selama ini sudah mengalami berbagai penafsiran yang sudah begitu jauh dari asalnya. Demikian juga dengan istilah *dayah* identik dengan *pesantren* atau *pondok* di Jawa, *surau* di Sumatera Barat atau *madrasah* di Timur Tengah. Bahkan di Aceh terdapat istilah lain yang nyaris bermakna sama, yaitu *meunasah* dan *rangkang*. Dayah ditengarai berasal dari kata bahasa Arab, *zawiyah* yang berarti pondok, ataupun balai yang biasanya terletak di samping masjid. Semua lembaga di atas berfungsi sebagai tempat mempelajari ajaran Islam dan sekaligus tempat tinggal.

Hal ini juga penting dilihat bagaimana eksistensi dayah terutama pada tataran kelembagaan dan wahana pendidikan Islam. Dan juga bagaimana andil institusi dayah dengan peran ulama di dalamnya dalam merespon zaman dengan berbagai pemikiran dan bahkan keterlibatan langsung dalam setiap permasalahan di daerah. Dayah di Aceh telah melahirkan ulama pejuang yang berpengaruh seperti Tgk Muhammad Daud Beureu-eh, Tgk

Chiek di Tiro, Tgk Fakinah, Cut Nyak Dhien, Pocut Baren, Tgk Chiek Pante Kulu dan Tgk Syekh Muda Wali al-Khalidy.

Dayah sebagai institusi pendidikan Islam telah banyak menciptakan Ulama, juru dakwah, pendidik, pemimpin, sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan umat serta mampu berhadapan dengan cobaan-cobaan dan rintangan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru tanah air. Ulama dan mubaligh telah menamatkan studinya di suatu dayah, kembali mendirikan dayah baru di daerah asalnya. Semenjak peradaban Barat masuk ke Indonesia melalui kaum penjajahan Belanda, telah banyak mempengaruhi pandangan bangsa Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan dayah. Pada awal pertumbuhan dayah, belum mengenal ilmu-ilmu umum, namun semenjak peradaban Belanda masuk, sistem klasikal mulai diterapkan dan mata pelajaran umum mulai diajarkan, akan tetapi dayah melaksanakan ide-ide pembaharuan pendidikan ini masih sangat sedikit. Dayah di Aceh berbeda halnya dengan dayah di tempat lain, seperti di Jawa pada awal abad ke dua puluh sampai permulaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada umumnya dayah masih bersifat tradisional namun bukan berlaku untuk seluruh dayah, ada juga yang telah memasuki ide-ide pembaharuan.

Keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional maupun yang sudah mengalami perubahan, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu dayah semakin tumbuh dan berkembang baik kualiti maupun kuantitinya. Tidak sedikit dari masyarakat yang masih menaruh perhatian besar terhadap dayah sebagai pendidikan alternatif. Karena pendidikan dayah berkembang sampai sekarang, modelnya senantiasa selaras dengan jiwa, semangat, dan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Secara umum tujuan pendidikan dayah merupakan bahagian dari tujuan pendidikan nasional, sebab pendidikan dayah ikut bertanggungjawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Maka tujuan pendidikan dayah adalah: mencetak insan-insan muslim yang menjadi pendukung ajaran-ajaran Allah secara utuh". Merujuk pada Al-Quran dan hadits, maka dasar utama dari tujuan pendidikan Dayah adalah diarahkan untuk ahli-ahli agama dan ulama yang menguasai ilmu agama serta mengamalkannya dengan tekun untuk berbakti dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Adz-Zariyat ayat 56 yang artinya; *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*. Secara umum, pendidikan Dayah bertujuan membina warga negara agar berkepribadian muslim yang sesuai dengan

ajaran-ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta mampu menjadikan diri sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus dari pendidikan dayah adalah sebagai berikut: Mendidik santri/pelajar menjadi seorang muslim yang bertaqwa. kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila. Mendidik santri/pelajar menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis. Mendidik santri/pelajar untuk memperoleh kepribadian yang baik dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat serta mampu untuk membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara. Mendidik santri/pelajar sebagai tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat/ lingkungannya). Mendidik santri/pelajar agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pembangunan mental spritual. Mendidik santri/ pelajar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat dan bangsa.

Memperhatikan tujuan yang hendak dicapai pendidikan dayah, maka dayah yang ada sekarang perlu diperbaharui fungsinya, eksistensinya tidak saja untuk mempersiapkan santri-santrinya untuk menjadi ulama-ulama ukhrawi yang mampu memberikan ajaran agama sahaja. Akan tetapi mampu meningkatkan dan memajukan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, ulama bukan saja menjadi perawat dan pembina mental spiritual, melainkan sebagai tenaga penggerak dalam pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, dayah harus dibina dengan baik agar menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang mengajar dan mendidik pengetahuan praktis disamping menjadi tenaga ahli dalam bidang agama.

Dayah sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: Penekanan utama pendidikan dan pembelajaran pada kecerdasan spiritual (SQ) di samping kecerdasan intelektual (IQ) dan emosional (EQ). Dengan ini diharapkan pelajar memiliki kecerdasan dan karakter yang kuat dan mudah bersosialisasi di masyarakat. Dayah merupakan institusi pendidikan tertua di bumi nusantara, ditumbuhkan oleh para wali, kyai dan penyebar Agama Islam yang melakukan *tafaqquh fi al-diin* dengan Ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang bersih batinnya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menyebabkan Ilmu yang diperoleh di Pondok Pesantren menjadi lebih berkat (*barakah*).

Pelajar sepenuhnya boleh dikawal dan dilindungi daripada pengaruh negatif tersebut. Dengan pendidikan berasaskan nilai-nilai Islam Nusantara, dayah menjadi lembaga mempunyai daya tahan dari pelbagai ancaman pengaruh negatif. Santri akan mampu mengintegrasikan ilmu yang diperolehi melalui madrasah formal dengan ilmu agama yang diperolehi melalui dayah. Ilmu inilah yang akan memudahkan para santri untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya.

Kurikulum pendidikan dayah sebagaimana dinyatakan Zulkhairi (2016) bahwa kurikulum memiliki peranan sangat penting pada suatu lembaga pendidikan. Ia menyimpulkan dalam tiga peranan yaitu; Peranan konservatif yaitu kurikulum yang kembangkan untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan standar nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Peranan kritis atau evaluatif adalah kurikulum berperanan sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan dan aktif berpartisipasi dalam melakukan kontrol sosial dan memberi penekanan pada pola berfikir kritis. Peranan ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang didasarkan pada pandangan filosofi progresivisme. Peranan kreatif adalah kurikulum untuk membangun kehidupan, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif serta berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan.

Memperhatikan peranan yang dimainkan kurikulum, hendaknya bagi setiap institusi pendidikan memiliki kurikulum yang jelas. Namun yang berlaku bagi pendidikan dayah berbeda dengan pendidikan formal biasanya. Kurikulum dayah lebih banyak ditentukan oleh otoritas seorang tengku sebagai pimpinannya. Hal ini menyebabkan ditemukan kesamaan kurikulum atau kitab-kitab yang dijadikan standar dalam pengajarannya, bahkan di sebagian dayah ada yang tidak ditemukan kurikulumnya. Perbedaan ini menunjukkan bahawa dayah masih kurangnya perhatian pihak dayah terhadap pentingnya kurikulum. Kurikulum dayah merupakan urutan kitab yang dipelajari oleh pelajar, di suatu dayah dan tidak distandarisi secara kolektif Zamakhsyari Dhofier.<sup>10</sup> Khusus untuk wilayah Aceh, pada tahun 2008 pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah (DPD)

---

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LPEES, 2011.

mengeluarkan kebijakan implementasi kurikulum pendidikan dayah di Aceh. Kurikulum pendidikan dayah tradisional menurut Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sebagai berikut:

No	Kelas	Bidang Ilmu	Nama Kitab
1.	Tajhizi (pemula)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid Akhlak Alqur'an	Safinatun Naja Awamel Dhammon Kitabul tauhid Pelajaran akhlak Tajwid
2.	I (satu)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid Akhlak Alqur'an Tarikh	Al Ghayah Wattaqrib (Matan Taqrib) Awamel/Aljarumiah Matan Bina Aqidah Islamiah Taisirul Akhlak Tajwid lanjutan Tarikhul Islam (Khulasah I)
3.	II (dua)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid Akhlak Hadits Tarikh Ushul Fiqh	Fathul Qarib/albajuri Matammimah Kailani Khamsatun Mautun Taisirul akhlak/Ta'limul muta'allim Matan Arba'in Khulasah II waraqat

No	Kelas	Bidang Ilmu	Nama Kitab
4.	III (tiga)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid tasawuf hadits tarikh ushul Fiqh mantiq	Fathul Mu'in (jilid I dan II) Syaikh Khalid Salsul Madkhal Khifayatul 'awam Ta'limul Muta'allim lanjutan Majaligus saniyah Khulasah jilid III Lathaiful Isyarah Matan Sulam

5.	IV (empat)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid tasawuf hadits tarikh ushul Fiqh tafsir mantiq bayan	Fathul Mu'in (jilid III dan IV) Matan Alfiyah Salsul Madkhal lanjutan Hud Hudi Muraqi 'Ubudiyah Majaligus Saniyah lanjutan Nurul Yaqin Lathaiful Isyarah Tasir jalalai Idhahul Mubham Ahmad shawi
6.	V (lima)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid tasawuf hadits tarikh Ushul Fiqh Tafsir Mantiq Bayan Mustalah Hadits	Mahalli Ibnu 'Aqil Mathluq Dusuki Sirajutthalibin I Majaligus Saniyah Nurul Yaqin Ghayatul Wushul Tafsir Jalalain Sabban Jauharul Maknun Minhatul Mughits

No	Kelas	Bidang Ilmu	Nama Kitab
7.	VI (enam)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid tasawuf hadits tarikh ushul Fiqh Tafsir Mantiq Bayan Musthalah Hadits	Mahalli II Ibnu 'Aqil lanjutan Mathlub lanjutan Dusuki lanjutan Sirajutthalibin II lanjutan Mujaligus Sanuyah lanjutan Nurul Yaqin lanjutan Ghayatul wushu lanjutan Tafsir Jalalain lanjutan Sabban lanjutan Jauharul Maknun lanjutan Baiquni

8.	VII (tujuh)	Fiqh Nahwu Sharaf Tauhid tasawuf hadits tarikh ushul Fiqh Tafsir Mantiq Bayan Musthalah Hadits	Mahalli Ibnu 'Aqil lanjutan Mathlub lanjutan Dusuki lanjutan Sirajutththalibi lanjutan Mujalisusu Sanuyah lanjutan Nurul Yaqin lanjutan Ghayatul wushu lanjutan Tafsir Jalalain lanjutan Sabban lanjutan Jauharul Maknun Baiquni lanjutan
9.	VIII (delapan)	Bustanul Muha qiqin wal muttaqiqi (pembekalan untuk calon guru)	Mahalli Ihya Ulumuddin Hyatul Wushu

Semua kitab atau mata pelajaran di atas diajari berdasarkan kemampuan guru (*teungku beut*) di sebuah dayah. Ada dayah yang kemampuan gurunya bisa mengajarkan para pelajar hingga ke tingkat mata pelajaran atau kitab Tuhfatul Muhtaj, namun ada juga yang hanya sampai hingga di mata pelajaran Fathul Wahab. Adapun mata pelajaran pelengkap seperti Ilmu Manthiq (logika) Ilmu Ushul Fiqh (tata hukum), Balaghah, 'Aruth dan sebagainya, tidak ada persamaan dalam pegangannya. Bahkan ada diantara dayah-dayah yang tidak mengajarkan sebagian daripada berbagai macam mata pelajaran tersebut.

Di dayah tradisional, ada beberapa kitab standar yang diajarkan, seperti: al-Bajuri, al-Mahalli, Nihayah al-Muhtaj, al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang tasawuf Ihya 'Ulum al-Din, dan al-Sanusi dalam teologi. Kitab-kitab ini tidak diajarkan di Dayah terpadu. Tidak diajarkan bukan berarti tidak adanya tenaga ahli sebagai pengajar, akan tetapi tidak cukup waktu untuk belajar secara intensif seperti di dayah salafi.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan metode belajar di dayah, Hendri Julian Ibrahim<sup>12</sup> menceritakan bahwa belajar di dayah berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Dayah masih menggunakan model pembelajaran Islam dari awal malui, iaitu sejak masa Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'tabi'in, dan seterusnya hingga masa kini. Model ini merupakan ciri

<sup>11</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam Abad Ke 16-17 Masehi*. Banda Aceh; LSAMA, 2013. Lihat juga dalam buku: *Pendidikan Dayah di Nanggroe Aceh Darussalam*,

<sup>12</sup> Hendri Julian Ibrahim, *Bertalaqqi di Mesir serasa mengaji di Aceh*, <http://aceh.tribunnews.com/2014/12/01/bertalaqqi-di-mesir-serasa-mengaji-di-aceh>, 2017.

khass pembelajaran dayah yang masih dikekalkan sehingga saat ini. Model pembelajaran tersebut dinamakan dengan belajar secara *talaqqi* dan *bersanad*. Pengajian secara *talaqqi* ini merupakan satu *juzuk* daripada sunnah Rasulullah apabila Rasulullah menerima wahyu daripada Jibril, dan menghafal wahyu tersebut terus dari Jibril. Kaedah pengajian semacam ini diteruskan hingga hari ini karena peraliran ilmu dan pecerahan kitab ulama yang *muktabar* disampaikan secara *bersanad* (dari guru kepada guru) sekaligus memelihara keaslian ilmu dan makna penulis kitab tersebut.

Pembelajaran dengan kaedah *Talaqqi* dimaksud pengajian ilmu Islam disampaikan dari guru kepada pelajar secara berdepan dan *bil musyafahah* (dari mulut ke mulut). Dimana seorang murid membaca matan kitab dan kemudian guru mensyarahkan isi dari kitab tersebut. Dalam tingkatan *talaqqi*, ada beberapa tahapan yang boleh diikuti. Ada *talaqqi* yang diperuntukkan bagi tahap pemula (*mubtadi*), tahap sederhana (*mutawassith*), dan untuk tahap akhir/*mutaakhir*. Kaedah lain, menurut Hasbi Amiruddin (2013) para pelajar datang satu persatu kepada seorang guru dengan copy teks (*kurah*) yang sedang mereka pelajari, kemudian guru membaca teks, memberi komentar dan catatan dalam bacaan tersebut, kemudian meminta pelajar membaca semula teks tersebut. Dan pada kelas tinggi, perbincangan lebih dianjurkan dalam segala aktiviti belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan kondisi seminar. Para guru biasanya berfungsi sebagai moderator, sekaligus nara sumber.

Tri Qurnati<sup>13</sup> menambah adanya kaedah *mukhabarah*, iaitu perbincangan untuk membincangkan masalah keagamaan, baik diantara sesama kyai/teungku (tenaga pengajar) atau sesama peserta didik pada tahap tinggi. M. Dian Nafi dkk<sup>14</sup> menyebut pada penguasaan kitab kuning, juga dilakukan melalui forum yang disebut *bahts al-masa'il*, musyawarah atau *munadharah*. Dimaksudkan dalam forum ini, peserta didik membahas dan membincangkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat untuk mencari penyelesaiannya secara fiqh (perundangan Islam). Disamping itu, peserta didik dilatih untuk belajar demokrasi dan menghargai berbagai pendapat.

Pendidikan dayah telah menerapkan model pembelajaran dalam bentuk *talaqqi* dan *bersanad* sejak awal mula adanya dayah dan masih kekal sampai saat ini. Model pembelajaran ini akan sangat menentukan tempoh masa belajar yang akan dihabiskan pada pendidikan Dayah bagi seorang pelajar. Sebab dayah tidak menentukan berapa lama masa untuk

---

<sup>13</sup> Tri Qurnati, *Budaya Belajar dan Ketrampilan Berbahasa Arab di Dayah Aceh Besar*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2007.

<sup>14</sup> M. Dian Nafi' dkk, *praksis Pembelajaran Pesantren*, Forum Pesantren Yayasan Selasih, 2007.

kajian satu kitab bagi seorang pelajar. Akan tetapi ditentukan oleh seberapa lama seorang pelajar boleh menamatkan sebuah kitab yang dikaji. Dayah dalam perkembangannya mengalami perubahan dan pembaharuan. Pada awalnya dayah di Aceh berbentuk tradisional, sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Diera sekarang, dayah mulai dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan, khususnya berkaitan dengan sistem pendidikan.

Terkait dengan problema pendidikan pesantren dalam interaksinya dengan perubahan sosial akibat modernisasi atau globalisasi, kalangan internal pesantren sebenarnya telah melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model pendidikan formal (sekolah), mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, di lingkungan pesantren dengan menawarkan perpaduan kurikulum keagamaan dan umum serta perangkat ketrampilan teknologis yang direncanakan secara sistematis-integralistik. Tawaran berbagai model pendidikan mulai dari Sekolah Dasar unggulan, Sekolah Lanjutan Menengah Pertama, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK).

Situasi yang ada, sangat sesuai dengan ajakan umat Islam dunia saat itu, mendukung membuat pembaharuan yaitu dengan mengadopsi pemikiran Timur Tengah. Ada yang mengalami perpecahan dari bentuk aslinya menjadi beberapa lembaga pendidikan Islam terpadu dan Modern. Dayah-dayah ini resmi membuka madrasah dan sekolah Islam. Tetapi dayah tradisional (*salafiah*) mempunyai tempat tersendiri di masyarakat Aceh. Sehingga dayah di Aceh masih sangat identik dengan lembaga pendidikan tradisional. Walaupun demikian, dayah memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan pendidikan Aceh, ini dibuktikan oleh dayah MUDI Mesra Samalanga. Pada tahun 2004, Dayah ini resmi membuka Perguruan Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Aziziyah (STAI). STAI ini menerima mahasiswa dari para santri yang telah menamatkan belajar di dayah tersebut, atau alumni dayah lainnya. Walaupun ada sebagian mereka telah memiliki ijazah Aliyah dari Madrasah Aliyah.

Sejak lama dayah telah mulai mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik maupun non fisik. Perubahan fisik yang jelas nampak antara lain: *Pertama*, bentuk bangunan, yaitu telah mengadopsi gaya modern untuk bangunan-bangunan di lingkungan dayah, disamping bangunan asli yang terdiri dari balai-balai belajar dan papan tulis seperti di sekolah umum, begitu juga ruang perkantoran, koperasi dan aula serta asrama yang dulunya berbentuk kamar (bilek) terkesan kumuh dan kotor, kini telah diganti dengan gedung asrama yang bernuansa moden. *Kedua*, telah tersedianya fasilitas-fasilitas umum, seperti sarana olah raga, perpustakaan, dan kantin, sarana seperti ini tidak dimiliki oleh dayah-dayah di Aceh pada umumnya, karena sebagian menganggap olah raga hanya hura-hura dan tidak

ada manfaatnya. Begitu juga perpustakaan, dulunya sama sekali di dayah tidak ada perpustakaan, santri memiliki kitab sendiri untuk belajar sesuai kelas yang ia duduki. Disamping telah tumbuhnya kesadaran dan keterbukaan wawasan dari ulama atau para pimpinan dayah, munculnya perpustakaan tidak terlepas dari peran Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan Pemerintah Aceh yang telah membantu menyediakan kitab- kitab dan buku-buku perpustakaan pada pendidikan dayah.

Perubahan non fisik antara lain; *pertama*, penggunaan kurikulum, karena model pembelajaran di dayah dilakukan secara turun temurun, maka kurikulum tidak menjadi suatu hal yang esensial bagi para pengurus atau pimpinan dayah. Walaupun demikian, pelajaran-pelajaran yang diajarkan di dayah terutama kitab- kitab kuning yang diajarkan telah ditentukan menurut kelas, dari kelas satu sampai dengan kelas tujuh. *Kedua*, telah memiliki manajemen baik dalam bidang akademik maupun keuangan. Dalam bidang akademik misalnya adanya jadwal ujian dalam setahun, dan kemudian diberi buku rapor hasil ujian. Bagi siswa yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dan hadiah. Di sebagian dayah, biasanya juga diadakan sayembara (*musabaqah*) setiap tahun. Materi yang diperlombakan biasanya adalah baca kitab kuning, pidato, dalail khairat, dan cerdas cermat (*fahmil kutub*). Dalam bidang keuangan, dayah juga memiliki bendahara umum dan bendahara kelas. Bendahara umum memegang kas dayah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan. Sedangkan bendahara kelas hanya sebagai pemegang kas kelas. Dalam membenahi manajemen ini, Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah mengadakan pelatihan untuk menertibkan administrasi dayah-dayah di Aceh.

*Ketiga*, adanya pelajaran-pelajaran tambahan (ektrakurikuler) bagi santri, seperti kemahiran berbahasa baik bahasa Arab (*muhadatsah*) maupun inggris (*speaking*), kemampuan menulis dalam dua bahasa asing tersebut, berceramah dan menjahit (khusus bagi santriwati). *Keempat*, penyelenggaraan sekolah umum setingkat Tsanawiyah dan 'Aliyah serta Sekolah Tinggi Agama Islam di Lingkungan dayah. Beberapa dayah telah menyelenggarakan sekolah setingkat Tsanawiyah dan Aliyah dan bahkan banyak diantaranya telah mengadopsi model Pesantren terpadu. Tetapi untuk dayah yang membuka perguruan Tinggi hanya Pesantren Ma'had Ulum ad-Diniyah Masjid Raya Samalanga (MUDI-Mesra). Nampaknya telah muncul sebuah iklim baru pendidikan di Aceh, sejak Dayah Mudi Mesra melalui Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al- Aziziyah. Sebuah langkah perubahan yang sangat berani dalam kalangan ulama Dayah. Langkah ini mendapat sanggahan yang luar biasa dari para ulama Dayah lain yang keberatan. Karena sebelumnya belum pernah ada dayah yang

membuka pendidikan Islam moden seperti ini. Hal ini dikhawatirkan oleh para ulama dapat menghilangkan ciri khas dayah itu sendiri.

Namun kekhawatiran tersebut sepertinya hampir tidak terjadi, dengan model pendidikan yang dijalankan sekarang, Dayah MUDI Mesra Samalanga masih bercirikan khas dayah yang dipadu dengan pendidikan modern. Ini adalah sebuah pemandangan baru di Aceh, walaupun hal ini telah lama dilakukan oleh ulama-ulama pesantren di Jawa. Alumni STAI Aziziyah yang berprestasi telah dipersiapkan untuk menjadi Dosen (pensyarah) nantinya, mereka diberikan beasiswa untuk melanjutkan magister (S2). Mereka yang dipilih adalah yang dipercaya untuk melanjutkan estafet dayah Tradisional yang bernuansa modern tersebut. Di samping itu, Hadirnya Badan Dayah di Aceh menjadi salah satu bukti keseriusan tekad Pemerintah Aceh untuk mengembangkan pendidikan dayah. Badan ini telah membantu dayah dalam pengembangan sumberdaya manusia dengan memberikan subsidi dan pelatihan yang berhubungan dengan manajemen pengembangan dayah di Aceh. Selain pengembangan secara kuantitas, dayah juga telah mengembangkan diri secara kualitas, melakukan perubahan-perubahan dalam upaya meningkatkan kompetensi keilmuan dan ketrampilan, agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sekarang ini sudah banyak alumni dayah yang menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi di IAIN dan STAIN/STAI. Para alumni kebanyakan bekerja sebagai guru, dosen/pensyarah, pengacara, penghulu dan penyuluh. Pada tingkat mahasiswa para alumni dayah telah membentuk organisasi alumni dayah, IMADA (katan Mahasiswa Alumni Dayah). Pada tingkat ulama dibentuk HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh). Kedua organisasi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi alumni dayah. Perubahan-perubahan yang terjadi di dayah disebabkan oleh dua factor utama, yaitu *pertama*, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, sebagai negara sedang berkembang tentunya masyarakat Indonesia sedang mengalami perkembangan ke arah masyarakat modern. Dayah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tetap mempertahankan ciri khas pendidikan dayah sendiri. Para alumni dayah diharapkan dapat bekiprah dan bersaing dalam dunia kerja serta ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat.

*Kedua*, modernisasi dan globalisasi. Arus modernisasi dan globalisasi sangat mempengaruhi para pimpinan dayah dalam mengorganisasikan dayah. Keterbukaan dan kebebasan informasi menjadikan para pimpinan dayah lebih elastis dalam mengelola lembaga pendidikan Islam tersebut. Para pimpinan dayah biasanya adalah alumni dari beberapa dayah lain di Aceh yang kemudian telah memiliki kecakapan, telah menamatkan belajar dan juga telah mengabdikan sebagai guru di tempat ia belajar. Oleh karena itu para

pimpinan dayah ini mendirikan dayah sesuai dengan dayah almamaternya. Dalam beberapa dekade terakhir, dikarenakan banyak para alumni dayah yang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi di IAIN, STAIN dan STAI, setelah lulus dan menjadi sarjana mereka mendirikan dayah yang lebih modern dengan perubahan- perubahan yang telah disebutkan, dan kemudian diikuti sedikit demi sedikit oleh dayah-dayah lain.<sup>15</sup>

### C. Konstruksi Gender di Dayah

Persoalan gender di Indonesia dapat dilihat dari aspek kultur agama Islam sebagai agama mayoritas. Ajaran Islam sendiri sebenarnya menjunjung tinggi keadilan, kesejajaran, menolak segala diskriminasi termasuk atas jenis kelamin. Semangat Islam menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, hanya ketaqwaan saja sebagai tolak ukur kualitas manusia. Namun selama ini berkembang pola pikir yang membentuk stereotip tentang subordinasi perempuan.<sup>16</sup> Hal ini kemudian membentuk rumusan tentang bagaimana menjadi perempuan dengan sikap dan tingkah laku yang diterjemahkan menjadi kodrat. Pandangan semacam ini sering kali diperkuat dengan legitimasi ajaran agama<sup>17</sup>, seperti kasus penolakan oleh sebagian masyarakat Aceh yang didukung fatwa ulama ketika ibu Illiza Sa`aduddin Jamal mencalonkan diri sebagai wali kota Banda Aceh ketika itu. Perempuan menurut kelompok ini tidak boleh menjadi pemimpin politik atau pemerintahan. Meskipun sebagian besar masyarakat Muslim lainnya tidak mempermasalahkan dan justru mendapat dukungan ulama dayah lainnya seperti Tgk Haji Usman Kuta Krueng, Tgk H. Muhammad Yusuf (Tu Sop), dan sejumlah ulama Aceh kharismatik lainnya.

Pesantren (di Aceh: dayah) sebagai salah satu institusi pendidikan agama Islam tentu memiliki peranan penting dalam sosialisasi gender. Selain pesantren salafi (tradisional) saat ini juga banyak berkembang pesantren modern. Pesantren yang dulu dipandang kolot, konservatif, dan tradisionalis kini banyak merubah diri menjadi pesantren modern. Di pesantren modern, sedikit banyak telah mengadopsi nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender di kalangan santri. Pesantren semacam ini banyak mengadopsi sistem pendidikan modern di satu sisi, namun di sisi lain masih mempertahankan ketradisionalannya. Dalam posisi yang demikian tentu ada konstruksi gender di kalangan santri yang berbeda.

Kajian tentang gender pada pesantren penting untuk dilakukan di era globalisasi saat ini menuntut adanya keterbukaan dan saling memahami satu sama lain. Perkembangan

---

<sup>15</sup> Marhamah, *Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh*, Jurnal al-Ta'dib; Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, tahun 2018, hal. 71.

<sup>16</sup> Puji Laksono, *Konstruksi Gender di Pesantren*, Jurnal Lakon, Vol. 6 No. 1, Edisi November 2017.

<sup>17</sup> Faiqoh. *Nyai : Agen Perubahan di Pesantren*. Jakarta : Kucica, 2003, hal. 79-80.

masyarakat Indonesia yang terus melakukan proses modernisasi, juga diikuti oleh pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam dalam masyarakat. Pesantren dituntut melakukan transformasi sistem pendidikannya agar tidak mengalami *cultural lag* di dalam perkembangan dunia dewasa ini. Keberhasilan dalam persaingan yang tinggi dalam lingkup kehidupan global sangat ditentukan oleh peran seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi peluang bagi perempuan untuk meningkatkan peranannya di sektor publik.

Menurut Oakley, sebagaimana dikutip Mansur Faqih, gender adalah sebuah bentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang lebih bersifat perilaku (*behavioral differences*) yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dan berlangsung dalam sebuah proses yang panjang. Jadi, gender merupakan bentukan sosial, maka penempatannya selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak bersifat universal, artinya antara masyarakat yang satu dengan yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. Gender berbeda dengan istilah seks. Seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang secara biologis melekat pada diri perempuan dan laki-laki<sup>18</sup>.

Pesantren dan santri merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain. Menurut Clifford Geerts,<sup>19</sup> santri memiliki definisi yang luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid atau sekolah agama yang disebut pesantren. Sedangkan dalam arti luas, santri adalah bagian dari masyarakat yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, pergi ke masjid pada hari Jum'at dan seterusnya. Kemudian Pesantren oleh Mujamil Qomar didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.<sup>20</sup> Para peneliti pesantren memiliki pandangan yang istimewa terhadap konstruksi sosial yang terjadi dalam lingkungan pesantren, dan salah satu yang sering dijadikan sandaran untuk melihat ini adalah teori konstruksi sosialnya Peter L. Berger.

Menurut teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dikemukakan bahwa diri seseorang sebagai konstruksi sosial, dimana individu merupakan aktor yang aktif dalam proses sosialisasi dan pembentukan identitas. Konstruksi sosial didasari oleh filsafat konstruktivisme, dimana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial

---

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hal. 71-72.

<sup>19</sup> Clifford Geerts, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1989, hal. 268..

<sup>20</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren : Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta : Erlangga, 2002.

antara individu dengan lingkungannya atau orang di sekitarnya. Kemudian individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Konstruktivisme seperti inilah yang disebut Berger dan Luckmann sebagai konstruksi sosial.<sup>21</sup>

Peter L. Berger<sup>22</sup> dan Thomas Luckmann, mendasari karyanya dengan sosiologi pengetahuan. Kunci dari sosiologi pengetahuan adalah gagasan-gagasan tentang “kenyataan” dan “pengetahuan”. Kedua gagasan itu bisa didefinisikan bahwa “kenyataan” yang dimaksud adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung pada kehendak atau di luar individu. Sedangkan “pengetahuan” yang dimaksud merupakan kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Kedua gagasan tersebut, dapat difahami bahwa “kenyataan” merupakan suatu realitas objektif, dimana ia berada di luar individu, sebagai fakta sosial yang memaksa. Sedangkan “pengetahuan” merupakan realitas bisa bersifat subjektif yang berada pada kesadaran individu.

Sehingga, dari gagasan di atas Berger dan Luckmann berpandangan bahwa realitas sosial memiliki definisi objektif dan subjektif. Masyarakat dan manusia sebenarnya memiliki ciri-ciri ganda. Di satu pihak masyarakat dan manusia adalah kondisi yang selalu ada dan hasil reproduksi yang berkesinambungan dari kegiatan agen manusia. Di pihak lain manusia adalah hasil kesadaran dan juga reproduksi dari kondisi produksi masyarakat.<sup>23</sup> Terjadi proses dialektika dalam dunia sosial, individu merupakan produk masyarakat dan sebaliknya masyarakat merupakan produk manusia. Masyarakat tercipta (sebagai realitas yang objektif) karena adanya berbagai individu yang mengeksternalisasikan dirinya (mengungkapkan subjektifitas) masing-masing lewat aktivitasnya. Seseorang hidup dalam kehidupannya mengembangkan suatu perilaku yang repetitif, yang mereka sebut sebagai “kebiasaan” (*habits*). Kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengatasi suatu situasi secara otomatis. Kebiasaan ini berguna juga untuk orang lain. Dalam situasi komunikasi interpersonal, para partisipan saling mengamati dan merespon kebiasaan orang lain, dan dengan cara seperti ini semua partisipan dapat menggantungkan diri pada kebiasaan orang lain. Karena kebiasaan ini, seseorang dapat membangun komunikasi dengan orang lain yang disesuaikan dengan tipe-tipe seseorang, yang disebut sebagai pengekhasan (*typication*). Dengan berjalanya

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2009, hal. 194.

<sup>22</sup> Paul Lewis, Peter Berger and His Critics: The Significance of Emergence. . new York. *Springer Science & Business Media*. Volume. 47. Nomor 3, .2010.

<sup>23</sup> Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi : Dari Filosofi Positivistic ke Post Positivistic*. Jakarta ; Rajawali Pers, 2010, hal. 62.

waktu, kenyataan selanjutnya, beberapa kebiasaan menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat, maka terbentuklah lembaga (*institution*).<sup>24</sup>

Maka dengan demikian terjadilah proses eksternalisasi dan objektifikasi, dimana manusia membentuk institusi dan masyarakat, dan manusia juga yang mempertahankan maupun mengubahnya. Proses eksternalisasi dapat diartikan sebagai usaha diri manusia ke dunia luarnya, baik kegiatan mental maupun fisik. Hasil kegiatan eksternalisasi ini kemudian berkembang ke proses objektifikasi, yaitu hasil eksternalisasi yang membentuk relitas objektif yang berada di luar dirinya, yang kemudian dilanjutkan dengan proses internalisasi yaitu terjadinya penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran subjektif, yang mana individu menjadi produk dari masyarakat.

Secara keseluruhan, tiga proses tersebut merupakan dialektika hubungan antara individu dan struktur sosial, yang mana manusia berinteraksi dengan satu sama lain untuk menghasilkan masyarakat dan bahwa produk sosial terus bereaksi kembali terhadap penciptanya, membentuk mereka kesadaran dan tindakan, dalam rantai tak berujung pengaruh timbal balik : Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah realitas objektif. Manusia adalah produk sosial.<sup>25</sup> Tesis utama Berger dan Luckmann adalah manusia dan masyarakat merupakan proses dialektis. Masyarakat merupakan produk manusia, namun akan berproses secara terus menerus, sehingga manusia juga merupakan produk dari masyarakat. Meskipun masyarakat terlihat objektif, namun kenyataannya dibangun dalam subjektifitas individu melalui proses interaksi. Jadi masyarakat tercipta, dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi. Dalam studi tentang konstruksi gender santriwati, maka persoalannya adalah bagaimana mereka mengkonstruksi realitas, mengkategorikan (*to typify*) dirinya sendiri, sesama santriwati, dan bagaimana mereka mengembangkan lembaga pesantren dengan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mereka anut bersama.

Institusi memungkinkan berkembangnya suatu peranan (*roles*) atau sekumpulan perilaku yang terbiasa (*habitual behavior*) dihubungkan dengan harapan-harapan individu yang terlibat. Ketika seseorang memainkan suatu peranan yang dia adopsi dari perilaku yang terbiasa, orang lain berinteraksi dengannya sebagai suatu bagian dari institusi tersebut ketimbang sebagai individu yang unik. Pada institusi tersebut juga berkembang apa yang disebut sebagai hukum (*law*). Hukum ini yang mengatur berbagai peranan. Oleh karena aktor telah menetapkan hukum berperilaku, maka institusi menjadi sebuah kendali sosial.

---

<sup>24</sup> Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Fenomenologi : Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung : Widya Padjadjaran, 2009, hal. 111-112.

<sup>25</sup> Paul Lewis, Peter Berger and His Critics: The Significance of Emergence. . new York. *Springer Science & Business Media*. Volume. 47. Nomor 3, .2010, hal. 208.

Jika kendali sosial ini akan dipertahankan dalam waktu lama, maka generasi berikutnya harus diajari untuk berpartisipasi di dalam institusi oleh para generasi tua. Dengan demikian institusi tersebut akan terlegitimasi dan terpelihara melalui tradisi dan edukasi. Jika suatu institusi bertahan dalam waktu lama, masyarakat dapat lupa bagaimana institusi itu terbentuk awalnya. Pada kasus ini, masyarakat dapat mulai membayangkan bagaimana institusi tersebut selalu dapat eksis, kondisi ini akan “menjadi kembali” (*came to be*) seperti pada awal terbentuknya. Kondisi ini disebut sebagai “pembendaan” (*reification*), dan institusi dikatakan “dibendakan” (*reified*).

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam sosialisasi gender. Pesantren modern, sedikit banyak telah mengadopsi nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender. Santri di pesantren ini melaksanakan proses pembelajaran di lokasi yang sama. Namun antara santri putra dan putri dipisahkan di gedung yang berbeda. Pesantren ini menanamkan nilai kepada semua santrinya untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini bisa dilihat dari organisasi santri yang diketuai oleh seorang laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki dan perempuan berdiri sendiri dengan tugas masing-masing. Sehingga tidak ada yang namanya memprioritaskan laki-laki.

Meskipun demikian di sisi lain pesantren ini masih mempertahankan budaya tradisional pesantren, yakni memberikan batasan-batasan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam batasan norma agama dan masyarakat patriarki pada umumnya. Dalam posisi yang demikian, memunculkan konstruksi gender di kalangan santriwati yang berbeda. Secara teoritis menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Luckmann, santriwati mulai mengalami proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain, baik dari media sosialisasi primer seperti keluarga atau orang dekat, maupun media sosialisasi sekunder seperti pergaulan keseharian, media massa, dan proses pendidikan di pesantren. Santriwati pun pada akhirnya bersama dengan para santriwati lainnya menjalin pendefinisian yang mengarah pada definisi bersama. Di sinilah santriwati membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Santriwati mulai melakukan proses eksternalisasi kembali. Para santriwati mulai melakukan pengungkapan subjektivitas yaitu mengkonstruksi pengetahuan menjadi perempuan menurut kultur pesantren yang mereka fahami. Hal ini diperoleh dari pengetahuan sebelumnya yang kemudian menjadi suatu realitas objektif sebagai hasil dari proses eksternalisasi.

Pengetahuan tentang perempuan yang dimiliki oleh santriwati menjadi perilaku kebiasaan. Seperti yang dikemukakan Berger dan Lukcmann, bahwa seseorang hidup dalam kehidupannya mengembangkan suatu perilaku yang repetitif, yang disebut sebagai “kebiasaan” (*habits*). Dalam situasi komunikasi interpersonal, para partisipan saling mengamati dan merespon kebiasaan orang lain, dan dengan cara seperti ini semua partisipan dapat menggantungkan diri pada kebiasaan orang lain. Karena kebiasaan ini, seseorang dapat membangun komunikasi dengan orang lain yang disesuaikan dengan tipe-tipe seseorang, yang disebut sebagai pengekhasan (*typication*). Pemahaman pengetahuan tentang perempuan yang dimiliki oleh santri, yang mana pesantren di satu sisi mengadopsi nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, dan di sisi lain masih mempertahankan nilai-nilai tradisional pesantren, yakni batasan-batasan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam batasan norma agama dan masyarakat patriarki pada umumnya. Dalam posisi yang demikian, memunculkan konstruksi gender di kalangan santriwati yang berbeda. Sehingga di sinilah dapat dilihat *typication* dari santriwati. *Typication* dari tindakan santriwati ini pada akhirnya membentuk kategorisasi santriwati berdasarkan tipe tindakan mereka dalam memaknai posisi perempuan dan laki-laki.

Tipikasi ini akhirnya membentuk tiga kategori santriwati dalam konstruksi gender. Konstruksi gender dapat dikategorikan menjadi, *pertama* santriwati modernis yang menilai bahwa semua pekerjaan ideal untuk laki-laki dan perempuan. Tidak mempermasalahkan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan. Santriwati modernis juga sepakat dengan kesetaraan gender karena peran sosial menurut mereka sama. Kemudian yang *kedua*, ada kategori santriwati tradisionalis-modernis, yang menilai tidak semua pekerjaan ideal untuk laki-laki dan perempuan. Pekerjaan untuk laki-laki menurut mereka lebih bersifat maskulin. Sedangkan pekerjaan perempuan lebih ideal bersifat feminim. Namun mereka tidak mempermasalahkan jika terjadi pertukaran peran antara laki-laki dengan perempuan dalam batas-batas tertentu. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, santriwati kategori pertama dan kedua yakni modernis dan tradisionalis-modernis juga sepakat dengan kesetaraan gender karena peran sosial menurut mereka sama.

Kemudian yang *ketiga* adalah kategori santriwati tradisionalis. Mereka menilai pekerjaan untuk laki-laki menurut mereka lebih bersifat maskulin. Sedangkan pekerjaan untuk perempuan lebih ideal bersifat feminim. Kategori ini tidak sepakat dengan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan. Kategori ini juga tidak sepakat dengan kesetaraan gender karena peran antara laki-laki dan perempuan sudah diatur dalam agama sehingga tidak boleh disamakan. Konstruksi gender santriwati merupakan proses dialektika, seperti

tesis Berger bahwa manusia berinteraksi dengan satu sama lain untuk menghasilkan masyarakat dan bahwa produk sosial terus bereaksi kembali terhadap penciptanya, membentuk mereka kesadaran dan tindakan, dalam rantai tak berujung pengaruh timbal balik, masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah realitas objektif. Manusia adalah produk sosial. Pemahaman diri santriwati dibentuk dari konstruksi sosial pesantren. Dimana santriwati merupakan aktor yang aktif dalam proses sosialisasi dan pembentukan identitas tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Santriwati berusaha menjadi individu yang ideal dari proses penyerapan nilai dan norma sosial pesantren dan masyarakatnya. Nilai dan norma sosial yang ideal tentang peran sosial. Mereka melakukan proses imitasi perilaku sosial sebagai perempuan yang dikategorikan baik menurut konstruksi budaya pesantren dan masyarakat tempat mereka tumbuh dan berkembang. Di tempat mengemban ilmu inilah santriwati melakukan proses internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi pengetahuan tentang gender.

## BAB TIGA

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam tentang pendidikan keulamaan perempuan pada dayah yang ada penyelenggaraan *ma`had aly* (*dayah manyang*) di Aceh secara ilmiah dan apa adanya, sesuai dengan data yang diperoleh melalui bacaan literatur dan hasil survei. Karena itu, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif dikarenakan hasil penelitian ini mencoba memetakan dan mendeskripsikan bagaimana persoalan-persoalan sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan di kalangan lembaga pendidikan dayah secara spesifik. Secara lebih khusus, penelitian ini berupaya mengungkap perhatian dan kepemihakan dayah terhadap proses pendidikan keulamaan perempuan. Data yang dihimpun, kemudain dianalisis secara kritis dan setelah itu dideskripsikan secara naratif. Karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji suatu teori, melainkan mengejar lebih jauh tentang hasil penelitian sebelumnya.

Melihat dari sifat data yang dikumpulkan, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*)<sup>1</sup>. Ditinjau sari masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian sosiologi pendidikan. Dayah sebagaimana diketahui adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam tradisional yang kini sedang mengalami proses pemodernan. Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu hendak menjelaskan bagaimana hambatan sosio-kultural telah memutuskan mata rantai regenerisasi perempuan untuk dididik menjadi ulama di lembaga dayah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-eksploratif. Didasarkan pada tempat dan sumber data penelitian, maka penelitian ini memadukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

#### B. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer adalah data yang diperoleh dari *informan* di lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket dan tela'ah dokumen. Sedangkan data sekunder adalah sumber referensi

---

<sup>1</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Procedures and Techniques*, yang diterjemahkan dengan *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. I, hal. 4. Lihat juga, Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 1, 13-15. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996, Edisi III, Cet. VII, hal 21, 53, 81 dan 143. Rulam Ahmadi, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UNM Press, 2005, cet. I, hal. 1.

kepuustakaan berupa konsep, teori, peraturan, ketetapan, dokumen, dan data pasif lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus dari survey ini.

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini berupa form angket dalam bentuk tertutup dan terbuka berupa pilihan pendapat tentang bagaimana mindset stakeholder (masyarakat pengguna alumni dayah) terhadap peluang dan tantangan kaum perempuan (santri dayah) sebagai calon ulama di masa mendatang. Instrumen lainnya adalah daftar wawancara dengan ulama dayah dan santri perempuan sebagai calon ulama yang sedang mendapatkan pendidikan di dayah yang ada penyelenggaraan *ma`had aly (dayah manyang)* di Aceh. Menyangkut bagaimana proses pendidikan keulamaan yang sedang ditempuh dan beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi selama pendidikan berlangsung. Instrumen lain yang juga digunakan adalah forms observasi lapangan secara langsung dengan mengamati berbagai rutinitas yang berlangsung di dayah, baik yang berhubungan dengan proses teaching maupun non-teacheng seperti budaya dayah secara keseluruhan. Instrumen yang terakhir adalah forms dokumentasi yang akan merekam segala bentuk dokumen yang diperlukan dalam penelitian

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi/pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi dalam wilayah penelitian, serta konteks sosial lain yang terlibat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### *a. Pengumpulan data primer,*

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang tidak terdapat dalam pranata sosial melalui pengumpulan secara langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara :

##### 1. Wawancara/interview

Merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang terpilih. Jenis kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisisioner dengan pertanyaan tertutup dimana jawabannya sudah ditentukan, namun terdapat pertanyaan lanjutan apabila jawaban responden tidak terdapat dalam jawaban pilihan. Pembagian kuisisioner ini dilakukan secara langsung dimana peneliti menggunakan kuisisioner dan langsung mewawancarai responden.

##### 2. Pengamatan Langsung/Observasi

Hasil observasi/pengamatan pada penelitian ini dicatat secara deskriptif, yang secara akurat mengamati dan merekam fenomena yang muncul dan mengetahui hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Data dan informasi tersebut dapat berupa tabel data kuantitatif maupun kualitatif, gambar maupun peta di wilayah penelitian, serta visualisasi foto, sebagai bahan analisis dan penjelasan.

b. *Data sekunder,*

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan beberapa instansi yang terkait dan validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Survei institusi

Survei institusi dilakukan kepada pranata sosial di basis akar rumput dalam lingkup kepemimpinan dayah dan unsur atau komponen lainnya yang ada di sekitar lingkungan lembaga dayah seperti pimpinan, pengurus, tenaga pengajar, tenaga administrasi, santri dan alumni, masyarakat pengguna. dan institusi terkait yang terkait.

2. Studi Literatur

Merupakan survei data maupun literatur yang berkaitan dengan sejumlah persoalan-persoalan sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat Aceh perbatasan dalam aspek pembauran kebangsaan. Literatur ini diperoleh dari pelbagai sumber yang tidak terbatas, seperti dari internet, *handbook*, dan referensi lainnya.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa penjelasan naratif terhadap apa yang teramati di lapangan. Analisis kualitatif bisa juga dalam bentuk uraian pendapat masyarakat tentang persoalan-persoalan sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dalam hal ini menyangkut tentang mindset masyarakat tentang ulama perempuan, proses pendidikan keulamaan perempuan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Semua informasi, data dan fakta yang berkembang dalam masyarakat dipadukan untuk kemudian dianalisis secara komparatif. Semua data yang diperoleh melalui sumber dan tehnik di atas diterjemahkan berdasarkan jenis data masing-masing. Data dari studi kepustakaan dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*. Sedangkan data dari studi lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik *descriptive analysis* dan *comparative analysis*. Yaitu data yang diperoleh selanjutnya dipelajari, diklasifikasi, dinyatakan, dibandingkan, ditafsirkan atau dimaknai secara kritis-komprehensif dan terakhir disimpulkan.

## F. Lokasi Lapangan Penelitian

Penelitian ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan di sejumlah dayah salafiah yang berada di beberapa daerah Tingkat II di Provinsi Aceh.<sup>2</sup> Karena luasnya lokasi penelitian, maka kemudian dibagi ke dalam zona-zona yaitu zona A yang terdiri dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Kota Lhoekseumawe. Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Zona B; terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Aceh Sinkil. Zona C terdiri dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Namun setelah ditemukan informasi yang menyatakan bahwa tidak semua dayah salafiah di Aceh menyelenggarakan program takhsish *ma`had aly* (*dayah manyang*), maka penelitian ini hanya mengambil fokus pada delapan dayah salafiah saja, yaitu;

- 1). Darul al-Munawarah Kuta Krueng (Pidie Jaya)
- 2). Dayah MUDI Mesra al-Aziziyah Samalanga (Kab. Bireun)
- 3). Dayah Babussalam Matangkuli Lhoekseukon(Aceh Utara)
- 4). Dayah Malikul Shaleh Tanah Luas Pantonlabu (Kab. Aceh Utara)

Berdasarkan penelitian awal (*preliminary research*) dan penelitian sebelumnya diperoleh informasi bahwa ketujuh lembaga pendidikan dayah yang dipilih di atas telah mendidik dan mengorbitkan sejumlah alumnus (santri) perempuan sebagai kader ulama dan kini telah berkiprah di masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat sebagai stakeholder pendidikan bisa menerima kehadiran kaum perempuan hasil didikan dayah dengan kualifikasi setingkat dengan ulama laki-laki. Di pihak lembaga dayah sendiri juga memberikan kesempatan dan membuka peluang yang sama kepada calon santri perempuan untuk dididik di dayah sebagai calon ulama di kemudian hari dan siap untuk mengabdikan kepada agama, nusa dan bangsa.

## G. Personil Penelitian

Kapasitas tim yang terdiri dari dosen senior yang membidangi ilmu Tarbiyah dan sosiologi agama dan berpengalaman dalam penelitian gender serta terlibat aktif dalam kajian gender. Ditambah lagi dengan dukungan mahasiswa yang umumnya aktivis dan aktif sebagai

---

<sup>2</sup>Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota; Pemkot Banda Aceh, Pemkot Sabang, Pemkot Lhoekseumawe, Pemkot Subulussalam, Pemkot Langsa, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Sinkil, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireun, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, dan Kab. Aceh Tamiang,

pekerja sosial dan pengabdian masyarakat. Tidak diragukan tim adalah peneliti yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Apalagi tim sudah cukup dekat dengan subjek penelitian, sehingga dipastikan tidak akan ada kendala dan tantangan di lapangan dalam rangka mensukseskan penelitian ini. Demikian juga dengan lembaga perguruan tinggi setaraf Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sebagai PTKIN tertua ketiga di Indonesia setelah UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta. Jadi, secara kelembagaan, penelitian ini layak dan pantas dilaksanakan.

Pada era modernisasi Aceh dimulai dari pembangunan kampus Darussalam sebagai pusat dan cikal-bakal pencerdasan intelektual generasi Aceh modern. Pembangunan kampus Darussalam menandai era Aceh baru pasca berlangsung konflik politik (DII/TII tahun 1953) antara Aceh dan pemerintah pusat. Sebagian dari tokoh-tokoh besar Aceh, diantaranya; Tgk Muhammad Daud Beureu-eh, A Hasjmy, Madjid Ibrahim, Ibrahim Hasan, Ibrahim Husein, Syamsuddin Mahmud, Safwan Idris, Dayyan Daud, Muslim Ibrahim, yang kemudian menjadi pemimpin di Aceh dan bahkan merambah ke level nasional merupakan alumnus kampus Darussalam. Mereka semuanya adalah pahlawan Darussalam sejati bagi diri dan keluarganya, serta bagi masyarakat dimana ia berkarya. Diantara mereka adalah seperti guru di daerah terpencil, imam dan pengasuh pengajian di perbatasan, relawan masyarakat, atau panutan (*informal leader*) masyarakat di peslosok entah-berantah di bumi Iskandar Muda ini. Semua mereka merupakan persembahan kampus Darussalam kepada masyarakat luas. Demikian juga dengan kami (tim) saat ini ingin meneruskan nama besar kampus Darussalam itu melalui penelitian ini.

## **BAB EMPAT**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan lokasi penelitian akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini. Data penelitian yang diperoleh dari lokasi pertama akan dipaparkan terlebih dahulu. Ma'had 'Aly Dayah Ma'had Ulumuddin al-Islamiyah (MUDI) Masjid Raya (Mesra) kota Samalanga. Ma'had 'Aly pada dayah ini didirikan pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan konsentisasi studi (takhassus) Fiqh wa Ushuluh (aktualisasi Studi Naskah Fiqh dan Ushul Fiqh). Ma'had 'Aly dayah MUDI Mesra mendapatkan legitimasi pendiriannya dari Kementerian Agama RI tahun 2016. Ma'had 'Aly MUDI Mesra memiliki mahasantri 180 orang, seluruhnya laki-laki. Mahasantri tersebut saat ini memasuki semester tujuh, dan belum ada yang lulus menjadi alumni Ma'had 'Aly. Wawancara dengan wakil pimpinan Mahad Ali Abu Mudi Tengku Sufriadi dan Tengku Nainunis. Seluruh mahasantri Ma'had 'Aly dayah MUDI Mesra Samalanga laki-laki berjumlah 180 mahasantri, angkatan pertama telah memasuki semester tujuh. Telah ada wacana untuk membuka pendaftaran untuk mahasantri perempuan namun terkendala dengan fasilitas yang belum memadai. Mahasantri perempuan harus ditempatkan pada lokasi dan pondok yang terpisah dengan mahasantri laki-laki. Faktor lainnya belum ada santri perempuan adalah karena 200 meter sebelum dayah Ma'had 'Aly Mudi Mesra terdapat kampus Institut Agama Islam (IAI) al-Aziziyah, dimana dikampus tersebut menerima mahasiswa perempuan. Sistem pembelajaran di kampus tidak jauh berbeda dengan dayah Mudi Mesra dimana Mahasantri Perempuan juga harus mondok di asrama yang tidak jauh dari lokasi kampus sekitar 200 meter. Jam pemondokan dari pagi sampai sore dilanjutkan sore kuliah di kampus dan menjelang malam kembali ke pondok.

Kesempatan belajar di Ma'had 'Aly bagi mahasantri perempuan menjadi keharusan untuk mendidik perempuan agar memiliki pengetahuan agama sehingga mampu mendidik anak-anak dan keluarganya serta sesama perempuan. Perempuan dibenarkan memiliki pengetahuan yang luas tetapi bukan eksis menjadi ulama yang tampil di publik dan menjadi seorang tokoh seperti laki-laki. Perempuan menjadi ulama umat dibatasi dengan fungsi-fungsi reproduksinya yaitu haid, nifas, menyusui dan kerentanan perempuan menghadapi pelecehan seksual sehingga mengharuskannya untuk didampingi mahram pada saat tampil di area publik. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak mungkin eksis berkiprah sebagai ulama perempuan yang diakui, menjadi panutan dan berpengaruh di masyarakat secara luas. Membuka kesempatan pada Mahasantri perempuan di Ma'had 'Aly MUDI Mesra belum

dapat dipredikasikan minatnya bagi kalangan perempuan, disamping belum memiliki fasilitas yang memadai juga soal keberlanjutannya dalam proses pembelajaran sampai lulus dari Ma'had 'Aly, misalnya Mahasantri perempuan harus memutuskan keluar dari pasantaren karena harus menikah, namun kebutuhan untuk membuka ruang pendidikan di Ma'had 'Aly bagi perempuan menjadi keharusan yang berguna agar para perempuan dapat berguru pada sesama perempuan sehingga ruang dan proses belajar lebih terbuka dan nyaman sesama perempuan. Walaupun perempuan telah mendapatkan pendidikan agama yang cukup luas tetapi dia bukan dipersiapkan sebagai ulama perempuan yang eksis di masyarakat tetapi sebatas ulama bagi anak-anaknya dan sesama perempuan.

Dari aspek penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku, sasaran Ma'had 'Aly hanya pada dua aspek yaitu, pengetahuan dan ketrampilan. Aspek akhlak dan perilaku tidak lagi menjadi prioritas karena dianggap telah selesai ditempa di tingkat ibtidayah, tsanawiyah dan Aliyah. Fokus dari segi keilmuan adalah minimal menghafal dan menguasai satu juz al-Qur'an dan menguasai beberapa kitab. Dari segi ketrampilan ada jenjang dimana kemampuan menguasai dan mengaktualisasi apa yang telah dikuasai. Salah satu kebutuhannya dalam aspek ketrampilan adalah bagaimana menelurkan ulama yang memiliki ketrampilan legal drafting, artinya bagaimana menuangkan pengetahuan agama misalnya tentang zakat bagaimana dituangkan dalam qanun baik ditingkat gampong, kabupaten dan propinsi. Walau masih dalam tahap harapan tapi Ma'had 'Aly sudah mulai merancang bagaimana melahirkan ulama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan dasarnya adalah kitab kuning yang direalisasikan dalam hukum positif. Aspek ketrampilan lain yang mulai berjalan adalah bagaimana merancang media dakwah melalui youtube, foto di instagram dan meme di media sosial. Namun kerampilan ini membutuhkan dosen khusus yang menguasai media dan pers dan ini menjadi pekerjaan rumah Ma'had 'Aly MUDI Mesra Samalanga ini.

Dari aspek kurikulum Ma'had 'Aly MUDI Mesra mengacu pada kurikulum berbasis SKS. Kurikulumnya dibangun sendiri tidak berdasarkan standar nasional seperti universitas. Harus ada kekhususan yang ditawarkan oleh Ma'had 'Aly. Kitab Kuning harus diintegrasikan dalam kurikulum, hal inilah yang membedakan antara Ma'had 'Aly dan Universitas lainnya, termasuk jam belajar dan intervensi dosennya. Mata Pelajaran di Ma'had 'Aly di tahap pengantar di semester satu adalah Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, karya ilmiah dan metodologi Penelitian. Pada semester berikutnya sudah mengarah ke pokoknya ushul fiq dan instingnya ke kawal inter fiqih jadi polanya tiga fiqihnya. Semester semester 5 dan semester 6 sudah tawa'et fiqih sosial, metode fiqih sosial dan fiqih mudarael sudah

keranah bagaimana mengaplikasikannya. Komposisinya antara pembelajaran agama dengan umum serta keterampilan dan pengetahuan adalah agama 90% umumnya 5% metode penulisan karya ilmiah, metode penelitian hukum sekitar 15% atau 85% ke agama, ilmu pengetahuannya difokuskan di semester 6, keterampilan di semester 6,7 dan 8. Keterampilan dan pengetahuan komposisinya bisa hampir 50-50. Untuk pengabdian masyarakat memiliki perencanaan khusus dimana melakukan pendidikan keagamaan di daerah terpencil seperti ke Pulau banyak, Simeule dan Singkil selama 20 hari khususnya di bulan Ramadhan.

Standar penilaian di Ma'had 'Aly adalah hasil belajar dimana pihak Mahad memberikan Ijazah pada para mahasiswa jika dianggap telah mampu menyebarkan keilmuannya berdasarkan sanatnya melalui tahapan yaitu pertama mampu menghafal matan minhat yang kedua menghafal matan logulusul yang ketiga bisa menghafal 100 ayat ahkam dan yang ke empat 30 hadist ahkam. Sidang munaqasyah dan karya ilmiah seperti skripsi belum diterapkan tetapi sudah ada polanya misalnya karya ilmiah bertemakan isu-isu sosial keagamaan di masyarakat dan solusinya. Hal yang belum disepakati dalam karya ilmiah dan sidang munaqasah adalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Dalam sistem penilaian naik ke semester berikutnya diberikan dua tugas dan ujian akhir dalam bentuk ujian tulis dan ujian lisan paling lama 15 hari. Standar kualifikasi dosen di Ma'had 'Aly dalam proses rancangan, namun yang berlaku saat ini dosen atau tenaga pengajar tidak harus lulusan S2 dan memiliki sertifikat pendidikan. Artinya jika dosen tersebut telah mendapat pengakuan dari masyarakat dan terkenal dengan penguasaan ilmunya maka mereka boleh mengajar di Ma'had 'Aly. Dosen Ma'had 'Aly ada yang telah melakukan penelitian jurnal internasional yang ditranskrip ke bahasa Inggris ke bahasa Arab.

Di Ma'had 'Aly tidak ada pengukuran kinerja dosen, karena dosen tidak dibayar gaji, remunerasi dan sertifikasi. Setiap lebaran hanya dibayar tunjangan 1 juta Rupiah, selebihnya mengajar dengan ikhlas karena dari awal memang sudah ditanam prinsip bahwa setiap yang telah memiliki ilmu harus bertanggungjawab melakukan pengabdian mengajarkan ilmu kepada yang lebih junior dan melakukan dakwah pada masyarakat. Ma'had 'Aly Mudi Mesra tidak memiliki sumber pendanaan yang tetap. Pada tahun 2016 dijanjikan 1 milyar oleh Kementerian Agama yang cair hanya 500 juta, tahun 2017 diberikan 250 juta, tahun 2018 Rp.25 juta. Sedangkan dari Mahasiswa hanya Rp 50 ribu perbulan dan mereka menanggung biaya makan sendiri. Untuk mengantisipasi dana operasional pondok melakukan penggalangan dana secara mandiri dengan membuka koperasi yang menjual alat-alat

kebutuhan para santri dan maha santri, membuka toko ATK dan foto copy dan membangun sarang walet.

Untuk dua tahun ke depan mahasantri perempuan di Ma'had 'Aly Mudi Mesra tidak dibuka karena ada beberapa faktor, pertama di lingkungan ini telah ada kampus Institut Agama Islam al-Aziziyah. Faktor kedua keterbatasan fasilitas dan ruang belajar karena mahasantri perempuan dan laki-laki harus diipisahkan. Faktor ketiga dikhawatirkan tidak mencapai target karena kemungkinan Mahasantri perempuan akan terputus di tengah perjalanan periode pendidikan karena harus menikah. Ulama perempuan bisa saja berkiprah dan eksis di ruang publik seperti istri Abu Yahya namun tetap menjaga norma-norma pada saat melakukan dakwah dengan didampingi mahram. Keulamaan perempuan harus terus didorong untuk mengembalikan harkat dan martabat perempuan seperti yang telah dibangun oleh Rasul dan dalam konteks sejarahpun Imam Syafii berguru pada perempuan. Namun kiprah ulama perempuan di ruang publik ada keterbatasan misalnya keluar malam harus ditemani oleh mahram.

Dalam seminar sufi Abu Mudi ada yang hadir berbagai negara, ada kesimpulan dimana ada pihak (tidak disebut siapa) merusak tabiah perempuan dan menuntut hak-haknya harus seimbang dengan laki-laki. Padahal laki-laki harus membiayai istrinya, dan perempuan mengurus rumah tangga. Dalam Islam memuliakan perempuan bahkan dalam hubungan intim, jika laki-laki belum bersih badan ditolak oleh istri berhubungan maka istri tidak berdosa. Warisan lebih banyak bagian untuk laki-laki karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Jika ada fakta perempuan menjadi tulang punggung keluarga kesalahannya bukan pada syariatnya kalau kita bawa ke syariatnya jelas tidak adil. Solusinya adalah . harus lebih dipertajam analisis kita tentang permasalahan ini, sebenarnya keadilan dalam agama keadilan yang proporsional. Pengalaman Abu Mudi menerima seorang pejuang gender yang menanyakan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, Abu Mudi menjelaskan ada ada 28 yang hak-hak yang harus di penuhi seorang suami terhadap istri. Seperti halnya dalam kitab yang sebenarnya hak untuk wanita sangat besar namun hak ini jarang di sampaikan dalam ceramah atau dakwah sehingga seakan-akan wanita itu di pojokkan oleh Islam.

Akses perempuan dan laki-laki dalam pendidikan harus sama, karena perempuan mempunyai peran membentuk generasi yang lebih baik ke depan, begitu pula halnya pendidikan bagi sesama perempuan akan lebih baik dan terbuka serta lebih efektif dan efisien dan bahkan keterwakilan perempuan di legislatif juga harus ada agar ada yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan agar

perempuan dan laki-laki memiliki akses pendidikan yang sama. Perempuan sebagai pendidik umat baik laki-laki dan perempuan, hanya untuk santri yang laki-laki harus ada batasan tertentu termasuk ruang pemisah antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang lebih baik menjadi pendidik bagi anak-anak, dimana laki-laki harus keluar mencari nafkah dan dalam agama seharusnya perempuan menjadi madharatul ulla buat anak-anak, jika perempuan mengasuh anak tanpa ilmu akan sulit bagi pendidikan anak.

Hasil wawancara dengan Mahasantri Muksalmina-Rifaldi dan mahasantri Muamar, Abdulwahab dan M. Muzaifi di depan pesantren Ma'had 'Aly. Belajar di Ma'had 'Aly lebih fokus pada mata kuliah tertentu dengan mengkaji satu permasalahan misalnya hukum tentang bank atau hukum tentang permasalahan kredit-kredit atau tentang lesing jual beli via lesing bagaimana mengkaji secara mendalam dengan menggunakan dalil-dalil al-Quran dan hadist. Mahasantri diberi tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajarkan adik-adik kelas atau para junior, jadi proses belajar di dayah tidak berhenti dan mengenal waktu, dimana proses kaderisasi di dayah terus menerus berjalan, jika dipagi hari, siang dan sore belajar sebagai Mahasantri di Ma'had 'Aly, pada malam hari atau hari libur harus membina dan mengajarkan para junior dengan metode diskusi kelompok, persentasi untuk mengkaji berbagai mata pelajaran dan kitab-kitab. Prinsip untuk menebarkan pengetahuan bukan saja pada saat di lokasi dayah, para guru selalu mengingatkan mahasantri jika suatu saat nanti Mahasantri berkiprah di berbagai lini mahasantri tetap harus menyebarkan pengetahuan agama dalam rangka membina masyarakat.

Tradisi dayah tetap terpelihara dimana, guru-guru mengajarkan mahasantri dengan ikhlas tanpa dibayar, maka mahasantri memberikan penghormatan yang sangat pada gurunya, sebagai bentuk bakti mahasantri pada guru adalah membantu guru turun ke sawah seminggu sekali dan sekaligus bentuk olahraga agar parasantri lebih sehat karena ada gerak fisik. Tidak merasa khawatir dengan peluang kerja, karena di dayah mereka telah dibangun satu prinsip bahwa Allah pasti memberikan rezeki pada umatnya, dan mereka melihat contoh tidak ada orang mondok di dayah mengalami kelaparan, mereka juga mendapatkan peluang dan fasilitas sama seperti orang lain diluar pondok, namun hal yang juga mereka merasa lega bahwa Ma'had 'Aly Mudi Mesra telah mendapatkan sertifikais dari Kementrian Agama sehingga peluang untuk pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau melamar pekerjaan lebih terbuka.

Mendapatkan banyak pembelajaran dari dayah karena jam belajar yang cukup panjang, pagi, siang, sore dan malam hari. Mata kuliah yang paling banyak dipelajari adalah fiq dan ushul fiq, peraturan pemerintah, kitab kuning dan kitab-kitab lainnya. Aspek

keterampilan membuat video, di update di Instagram dan metode dakwah lainnya. Ada Mahasantri difasilitasi ke luar studi banding bagaimana cara menyampaikan dakwah yang mudah diterima masyarakat muslim. Metode mengajarkan ilmu dakwah cara beradabatasi secara langsung kita buat pengajian di media sosial. Ketrampilan komputer diajarkan membuat powerpoint dan cara persentasi yang dipraktekkan pada adik-adik kelas. Selain itu juga diasah ketrampilan bahasa Arab dan bahasa Inggris dan menjadi bahasa komunikasi di dayah bahkan ada yang telah menjadi mudafir atau pengajar bahasa arab dan bahasa Inggris. Yang dibutuhkan mahasantri saat ini adalah tentang jurnalistik yang belum memadai karena strategi dan media dakwah saat ini membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan tentang jurnalistik.

Dari fasilitas sudah cukup memadai seperti komputer, ruangan ber-AC termasuk ruang belajar dan perpustakaan. Ilmu yang diberikan oleh dosen sudah cukup puas, sebagian dosen telah mengambil S3, dan metode belajar beda-beda setiap dosen misalnya digabung 2 kelas dengan metode diskusi kelompok dan persentasi. Selain itu juga diajarkan cara menyusun qanun dengan menggunakan dasar hadist. Dalam hal Pengabdian masyarkat diajarkan bagaimana menggali kebutuhan masyarkat termasuk melakukan pengabdian masyarkat melalui dunia maya dengan membaut web dan materi hukumnya. Sebagaian mahasantri sudah melakukan pengabdian masyarkat atau hikmatul ummah dikirim ke Medan dan Singkil dimana dilokasi tersebut pengetahuan masyarkat tentang ilmu agama sangat minim, dan kami hadir untuk memberikan pencerahan pada masyarakat disana.

Kaderisasi ulama perempuan penting dilakukan, seperti daerah terpencil di singkil salah satunya butuh perempuan yang berpendidikan untuk membuat pengajian bagi sesama perempuan, karena dengan sesama perempuan akan lebih nyaman jika ada laki-laki akan malu bertanya dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah namun sepanjang tidak menimbulkan fitnah jika alaki-laki belajar pada ulama perempuan tidak bermasalah. Dalam sejarah anak dan istri Rasul perempuan orang yang berilmu, perempuan harus berilmu terutama untuk membentuk karakter dan ketauhidan anak. Interaksi laki-laki dan perempuan di Ma'had 'Aly harus setara namun batasannya telah diatur agama di kitab kuning. Dalam beberapa hal dalam agama dilebihkan para lelaki dan dalam beberapa hal dilebihkan perempuan. Tidak ada yang boleh lebih di satu sisi, dan tidak bisa disamakan perempuan dan laki-laki terutama dalam batasan aurat. Dan dilebihkan bagi perempuan untuk berbakti pada suami mendapatkan pahala yang lebi besar dibandingkan suami walaupun dia berjuang dalam peperangan yang sangat berat dan melelahkan. Eksisnya perempuan di ranah publik dapat sekedarnya saja, seperti Umi Fairuz istrinya Abu Yahya, beliau eksis di media sosial,

walaupun beliau menyampaikan dakwah melalui video tetapi tidak menampakkan wajahnya, sehingga kiprah perempuan dapat saja di ruang publik hanya saja ada batasannya, hal tersebut bertujuan unyuk menjauhkan fitnah. Perempuan bisa saja mengambil peran di ruang publik tetapi tidak boleh melanggar syariat, misalnya perempuan yang berperan di ranah publik harus ditemani mahram dan dipastikan tidak ada gangguan dan merasa aman.

Kendala dan dukungan penelitian di kampus Ma'had Aly Mudi Mesra kendala;

- a. Tidak ada Mahasantri dan dosen perempuan, sehingga hasil wawancara hanya dalam perspektif laki-laki, belum ditemukan bagaimana akses, partisipasi, manfaat dan kontrol pendidikan di Ma'had Ali dalam perspektif perempuan
- b. Adanya peraturan yang cukup ketat di dayah yang mengharuskan ruang laki-laki dan perempuan harus terpisah, sehingga peneliti perempuan tidak diizinkan masuk lebih mendalam dalam ruangan-ruangan belajar dan asrama mahasantri laki-laki
- c. Di kota Salamalanga tidak tersedia penginapan yang memadai sehingga peneliti harus ke Biureun dengan jarak tempuh satu jam dari lokasi penelitian sehingga waktu malam hari tidak bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian di dayah Mudi Mesra.

Adapun dukungan yang diperoleh antara lain adalah;

- a. Pihak pengelola kampus Ma'had Aly sangat aware dan care pada peneliti mereka memfasilitasi peneliti dengan cukup baik, misalnya menghubungi mahasantri dan dosen yang akan diwawancarai
- b. Meluangkan waktu yang tidak dibatasi kepada peneliti sehingga memiliki keleluasaan dalam melakukan wawancara

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dayah Ma'had 'Aly Mudi Mesra yang telah berjalan dari tahun 2016 belum ada Mahasantri perempuan. Ketiadaan Mahasantri perempuan ini dianggap belum terlalu penting untuk di buka atau diadakan karena ada beberapa faktor; pertama dilingkungan kampus Ma'had 'Aly Mudi Mesra ( 200 M dari dayah) ada kampus Institut Agama Islam Al-Aziziyah yang membuka peluang bagi perempuan untuk belajar. Sistem pengajaran di kampus tersebut hampir sama dengan Ma'had 'Aly, yaitu sistem pemondokan, di pagi sampai sore mereka di pondok, sore sampai menjelang malam kuliah di kampus dan kembali ke pondok lagi, sebagian dosennya juga yang mengajar di Ma'had 'Aly Mudi Mesra. Faktor Kedua fasilitas pembelajaran dan pemondokan di Mudi Mesra bagi Mahasantri perempuan belum tersedia, karena antara mahasantri perempuan dan laki-laki harus dipisahkan baik asrama, ruang belajar. Faktor ketiga pihak pengelola Ma'had 'Aly Mudi Mesra khawatir jika membuka peluang bagi Mahasantri perempuan tidak mencapai

target pembelajaran karena Mahasantri perempuan ada yang harus menikah dan keluar dari pondok sehingga proses pembelajaran terputus.

Di sisi lain menurut pengelola Ma'had 'Aly Akses pendidikan bagi Mahasantri perempuan harus sama dengan laki-laki bahkan harus dijamin dalam kebijakan, namun kaderisasi mahasantri perempuan menjadi ulama bukan eksis di ruang publik, artinya bukan seperti ulama laki-laki yang menjadi tokoh, menyebarkan ilmu secara luas di masyarakat namun keberadaan ulama perempuan sebatas untuk mendidik anak-anak dalam keluarga dan mendidik para perempuan. Alasan keberadaan ulama perempuan yang terbatas disebabkan perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan harus ditemani oleh mahram untuk memastikan perempuan aman dan tidak mengalami gangguan seperti pelecehan seksual dan bentuk gangguan lainnya. Budaya keakraban dan menghormati sesama santri dan terutama guru sangat kental, kondisi ini terbangun karena guru mengajar secara ikhlas tanpa dibayar seperti pegawai pemerintah, dan perusahaan. Keikhlasan ini memang dibangun mulai tingkat Ibtidayah, tsanawiyah dan Aliyah dimana seorang santri yang telah memiliki ilmu harus melakukan kaderisasi pada junior-yuniornya. Salah satu bakti mereka kepada guru adalah membantu guru ke sawah seminggu sekali. Sebagian guru atau dosen selain memiliki sawah mereka juga melakukan bisnis lain seperti membuka warung kopi, warung kelontong dan lainnya. Tradisi dayah masih sangat kental baik dalam berpakaian (sarung) dan juga perilaku mereka dalam menghormati pihak lain.

Sistem kurikulum dan kinerja tenaga pendidik masih dalam proses membangun pola, namun Ma'had 'Aly berupa agar sistem tersebut harus memiliki spesifikasi dibandingkan dengan kampus UIN atau Istititut Agama Islam lainnya, misalnya pengakuan tentang kapasitas seorang dosen di Ma'had 'Aly, jika dosen tersebut dikenal sangat mendalam suatu bidang ilmu dan diakui oleh masyarakat walaupun dia bukan sarjana maka dia berhak mengajar di Ma'had 'Aly. Begitu pula dalam hal kurikulum pihak Ma'had 'Aly berupa menyesuaikan agar tradisi pesantren tetap terpelihara dan sesuai kondisi ke Aceh dan tidak terjadi generalisasi Ma'had 'Aly seluruh Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi Kementerian Agama. Ma'had 'Aly tidak memiliki sumber pendanaan yang permanen, sehingga untuk membiayai biaya operasional dayah melakukan pengalangan dana mandiri dengan membuka usaha dayah berupa koperasi yang menjual bahan kebutuhan santri dan membuka usaha ATK Foto copy dan sarang burung walet. Kondisi lingkungan sekitar dayah memungkinkan untuk usaha tersebut karena letaknya jauh dari pusat pertokoan (keude Samalanga), dan keberadaan dayah juga membuka pendapatan bagi masyarakat sekitar dayah. Masyarakat membuka warung kopi, makanan, toko pakaian yang sasarannya konsumen pada

keluarga dan sahabat yang mengunjungi santri. Pengelolaan usaha masyarakat disekitar dayah dilakukan oleh perempuan termasuk usaha laundry dan membuka pesanan rantangan bagi para santri. Ma'had 'Aly berupaya mengikuti perkembangan zaman dalam hal teknologi informasi, dimana dalam materi pembelajaran yang menitikberatkan pada ketrampilan untuk membangun media dakwah melalui media sosial seperti youtube, instagram namun kebutuhan untuk membangun ketrampilan dan pengetahuan tentang dunia jurnalistik masih menjadi pekerjaan rumah di Ma'had 'Aly Mudi Mesra.

Data yang terhimpun pada penelitian di lokasi kedua, di dayah Babussalam Matangkuli dapat dijabarkan berikut ini. Kendati dayah Babussalam saat penelitian ini dilakukan belum menyelenggarakan Ma'had 'Aly secara resmi, namun persiapan yang dilakukan cukup meyakinkan bahwa dayah ini telah siap dalam waktu dekat untuk membuka program Ma'had 'Aly ini. Buktinya calon santri dan sarana-prasarana yang dibutuhkan sudah disiapkan secara terencana dan bahkan telah dibangun sebuah gedung bertingkat sebagai tempat berlangsungnya pendidikan Ma'had 'Aly. Dalam rangka mempersiapkan dan menyambut diselenggarakannya Program Ma'had 'Aly (*Dayah Manyang*) di Dayah Babussalam, pimpinan dan seluruh unsur penyelenggara pendidikan dayah telah membuka dan menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) sejak tahun 2015. PDF merupakan salah satu alternatif prasyarat bagi formalitas penyelenggaraan Program Ma'had 'Aly di dayah. Tgk. Sirajuddin merupakan pimpinan dayah dan sekaligus pimpinan Program Ma'had 'Aly. Pendidikan Diniyah Formal berbeda dengan Program Pendidikan Dayah Terpadu, dimana legalitas program ditandatangani oleh kepala jenjang sekolah masing-masing. Pendidikan Diniyah Formal merupakan program khusus Kementerian Agama di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren. Pendidikan Diniyah Formal memiliki tiga jenjang pendidikan, yaitu; *Ula* (SD/MI), *Wustha* (SMP/MTs), dan *'Ulya* (SMA/MA) dengan ijazah penyetaraan (*mu'adalah*) sebagaimana jenjang pendidikan formal. Keunikan lain dari program persiapan Ma'had 'Aly ini adalah santri tidak diwajibkan memakai pakaian seragam, tidak mesti belajar di ruang kelas, jadwal belajar tidak mesti pagi hari, namun disesuaikan dengan kesempatan guru, tenaga pendidik dari kalangan ulama/guru internal dayah sendiri dan tidak ada pengutipan biaya terhadap peserta didik yang notabene adalah santri dayah itu sendiri. Pelajaran utamanya adalah kajian terhadap kitab-kitab klasik dan ditambah dengan mata pelajaran umum lainnya seperti Matematika, IPA dan PPKn. Administrasi penyelenggaraan pendidikan hampir sama dengan yang berlaku di lembaga

pendidikan formal, seperti ketersediaan dana BOS, NIS, rapor siswa serta administrasi lainnya merujuk pada sistem administrasi sekolah pada umumnya.

Program Ma`had `Aly pada dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara secara resmi baru diresmikan pada Selasa 6 Agustus 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M Daud Pakeh dan juga turut dihadiri oleh Direktorat Pondok Pesantren Kemenag RI yang diwakili Kasi Ketenagaan Subdit Diniyah, Agus Umar. Penyelenggaraan Program Pendidikan Ma`had `Aly menurut Menteri Agama merupakan program unggulan kementerian Agama RI yang telah dituangkan dalam PMA No. 71 tahun 2015 dimana Ma`had `Aly menyelenggarakan program akademik Strata satu (S1) guna melahirkan sarjana Islam yang menekuni disiplin ilmu keagamaan (*yatafaqquh fiddin*). Ma`had `Aly adalah wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual tingkat tinggi yang keberadaannya melekat pada pendidikan pesantren. Secara keagamaan, posisi Ma`had `Aly adalah jenjang Pendidikan Tinggi Keagamaan pada jalur Pendidikan Diniyah Formal. Kehadiran Ma`had `Aly seperti universitas khusus akan melahirkan para alim ulama di bidang agama, yaitu mampu mencetak orang-orang yang memiliki keahlian ilmu agama. Saat itu Kakanwil Kemenag Aceh menerima Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 2885 Tahun 2019 dengan takhassus (konsentrasi) bidang Tafsir wa `Ulumuha. SK tersebut diserahkan oleh Direktur Pondok Pesantren Kemenag RI kepada Kakanwil Kemenag Aceh dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara, Waled H Sirajuddin Hanafi. Dayah Babussalam adalah dayah dengan tipe A plus di Aceh.

Lulusan Ma`had `Aly diharapkan menjadi ulama muda yang siap pakai di masyarakat. Sebagai calon mahasantri Ma`had `Aly (MA) Babussalam untuk tahun akademik perdana (2019/2020) adalah lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Babussalam sendiri yang sekarang ini sudah menyelesaikan proses pendidikannya. Tidak hanya itu saja, calon mahasantri juga diterima dari santri dayah yang saat ini sedang belajar di tingkat VII dayah salafiah murni serta lulusan dayah salafiah pada umumnya, baik dari dalam dayah Babussalam maupun dari luar. Salah satu kelebihan model pendidikan diniyah formal dan ma`had `aly bergabung dalam sistem pendidikan dayah salafiah adalah tidak ada kesan pemisahan antar santri antar masing-masing jenis, satuan dan jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh dayah.

Kitab (referensi) rujukan dalam program PDF dan MA menggunakan kitab-kitab standar (*turath*) karya ulama klasik abad pertengahan terutama yang bermazhab Imam al-

Syafi'iy. Kitab tafsir seperti karya Ibnu Katsir, Jalalain, Khazan. Fiqih seperti mahalli, fathul wahab, dan lain-lain. Dalam bidang fiqih/ushul fiqh merujuk kepada kitab-kitab seperti al-Bujuri, al-Iyanah, al-Um dan Mahalli. Karena itu untuk bisa menjadi calon mahasantri adalah telah menyelesaikan sejumlah kitab fiqih standar pada jenjang pendidikan PDF.

Santri dayah Babussalam ada yang berasal dari daerah sekitar Matangkuli, Lhoekseukon, Lhoekseumawe, dari Aceh secara keseluruhan dan ada juga dari luar Aceh seperti dari Peikan Baru, Jambi, Palembang dan Kalimantan. Sebagian besar orang tua merasa berterima kasih kepada pimpinan dayah dan para guru karena telah mendidik putra-putri mereka dengan ilmu agama dan pengamalan ibadah yang terkontrol. Orang tua merasa sangat puas menyantrikan anak-anak mereka ke dayah. Salah satu keunikan dayah Babussalam adalah persentase jumlah santri perempuan nyaris berimbang jumlahnya dengan santri laki-laki, yaitu 60% santri laki-laki berbanding 40% santri perempuan. Bahkan pada jenjang PDF santri perempuan mencapai 50% dan menurut keterangan Waled Sirajuddin bahwa semua santri perempuan di kelas PDF itu akan melanjutkan pendidikannya ke Ma'had `Aly di tahun ajaran 2019 ini. Hal ini menunjukkan bahwa minat dan antusiasme santri perempuan untuk menjadi ulama sangat potensial. Konon lagi kepemihakan pimpinan dayah terhadap calon mahasantri perempuan ini sangat nyata dan tidak diragukan lagi.

Sosok Waled Sirajuddin di mata masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bukan rahasia lagi. Ulama dayah kharismatik ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mengajak dan mengayomi masyarakat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di daerahnya. Karena itu melalui Forum Ormas Kabupaten Aceh Utara secara rutin mengadakan seruan bersama semua unsur Forkopimda dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Bupati, Dandim, Kapolres, Ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, unsur pemuda, pegiat LSM dan komunitas media (insan pers) secara bersama-sama mengadakan seruan kepada masyarakat agar selalu menjaga dan memelihara suasana yang kondusif, aman dan damai melalui pengamalan ajaran agama (syari`at Islam), patuh pada ketertiban umum yang digariskan pemerintah dan menghindari diri dari sikap dan perbuatan yang melawan hukum, baik hukum adat, agama dan negara. Waled juga merupakan ketua Pengajian rutin Tasawuf, Tauhid dan Fiqih se-Kabupaten Aceh Utara.

Lokasi penelitian ketiga adalah Dayah Darul Munawarah Abu Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Ma'had Aly Pondok Pesantren Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi

Aceh merupakan salah satu pondok pesantren yang telah melaksanakan program Mu'adalah dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

Adapun Visi dan Misi Dayah Darul Munawarah adalah sebagai berikut;

a. Visi

Sebagai pusat unggulan (center of excellent) studi ilmu keislaman dan kaderisasi ulama, pewaris tradisi ilmiah dan amaliyah salaf shalih dalam mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dan tradisi akademik perguruan tinggi, dengan kompetensi mengaktualisasikan ilmu-ilmu agama bagi kemaslahatan umat manusia.

b. Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan studi keislaman yang mendalam, utuh dan komprehensif.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kaderisasi ulama dengan membekali dan menamkan tradisi ilmiah dan amaliyah shalaf shalih.
3. Menyelenggarakan dan melaksanakan sistem pendidikan pondok pesantren setingkat perguruan tinggi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengadakan perpustakaan yang representatif bagi studi keislaman.
5. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi serta lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
6. Menumbukembangkan pelbagai program penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Membentuk jaringan alumni dan pemberdayaannya.

Sedangkan orientasi, tujuan dan fungsi Dayah Darul Munawarah adalah sebagai berikut;

a. Orientasi

Ma'had Aly Darul Munawarah berorientasi pada kualitas, kebenaran dan kemashlahatan bagi seluruh kepentingan bangsa dan negara serta agama sebagai konsekuensi logis bahwa Islam adalah *rahmatan lil`alamin*.

b. Tujuan

1. Menyiapkan dan mengantar mahasantri menjadi kader ulama yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, yaitu; shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah serta dapat menjalankan fungsi keteladanan, kependidikan, penyuluhan, pengembangan masyarakat dan pemberi fatwa keagamaan sesuai

dengan bidang keahlian dalam ilmu-ilmu keislaman masing-masing dan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi.

2. Mengantarkan mahasiswa menjadi kader ulama atau cendekiawan yang memiliki kemauan dan kemampuan akademik, terbuka, bertanggungjawab, berdedikasi dan peduli terhadap bangsa dan negara serta berperspektif bahwa Islam adalah *rahmatan lil' alamin*.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

#### c. Fungsi

Ma'had Aly Darul Munawarah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan keislaman; sebagai pusat pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu keislaman; sebagai pusat pengabdian bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadaban (*civil society*); sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, khususnya umat Islam.

Ma'had Aly Darul Munawarah adalah berstatus sebagai program pengkajian tingkat tinggi dalam sistem pendidikan pesantren. Sebagai sebuah program, maka secara organisatoris ia berada satu atap dengan Pondok Pesantren Darul Munawarah. Ma'had Aly ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki keserjaan yang khas; yaitu menguasai ilmu-ilmu yang tinggi disertai kemampuan mengkaji kitab-kitab klasik (*turats*) berbahasa Arab, melahirkan sarjana yang mampu menampilkan sikap shalih disertai kemampuan mengerjakan amalan ritual keagamaan. Sarjana yang intern terhadap kehidupan umat disertai dengan kesanggupan terlibat langsung dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. Sarjana yang memegang pada prinsip belajar sepanjang hayat (*long live education*); minal mahdi ilal lahdi, meneliti untuk mendalami dan mengembangkan ilmu tanpa berkesudahan sebagai konsekuensi logis seorang ulama. Sarjana yang siap dan mau mengabdikan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Para alumnus Ma'had Aly Darul Munawarah nantinya secara umum diharapkan mampu menguasai secara mendalam hukum Islam (*yatafaqqahu fi al-din*), memiliki jati diri (integritas moral), handal dan siap pakai di masyarakat, serta bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga kompetensi lulusan akan siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja. Untuk itu mereka dibekali dengan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang holistik. Output dari Ma'had Aly

Darul Munawarah nanti akan dapat diserap oleh berbagai lembaga Pemerintah serta institusi yang membutuhkan. Mereka akan mengambil posisi sebagai tenaga pendukung pada beberapa instansi seperti Dinas Syariat Islam provinsi, dan kabupaten.

Output yang akan dihasilkan oleh Ma'had Aly Pondok Pesantren Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dapat diserap oleh lembaga pemerintah di bawah Departemen Agama di dua Kabupaten/kota terdekat. Yaitu; Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, demikian juga Kantor Departemen Agama Kecamatan dalam Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya sebanyak 31 Unit dan Dinas Syariat Islam dua unit, Mahkamah Syariah dua unit, Wilayatul Hisbah dua unit, Baitul Mal dua unit dan Baitul Qiradh Enam unit.

Sekarang ini pelaksanaan hukum di Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam telah menggunakan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2006 yang menempatkan syari'at Islam yang bersumber pada Al Quran dan Hadits sebagai dasar yang mengatur tata hidup masyarakat Aceh. Tentu saja untuk memberikan penyuluhan hukum Islam di kalangan masyarakat dibutuhkan lebih banyak tenaga yang memahami Ilmu Agama Islam (Hukum Islam), seperti juga di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Oleh karena itu, Ma'had Aly Darul Munawarah sangat memungkinkan menciptakan alumni yang memahami secara mendalam bidang Ilmu Agama Islam yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya khususnya dan Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam pada umumnya. Termasuk Bank Syariat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariat.

Pogram Ma'had Aly Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam adalah salah satu Pogram Dayah (pesantren) Tinggi yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, dimana sumber calon mahasantri yang akan masuk pada Pogram Ma'had Aly ini dapat dikatakan cukup banyak. Karena jumlah sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah di dua kabupaten ini mencapai 103 unit. Jumlah Siswa dari sekolah tersebut, yang sekarang duduk di kelas III saja mencapai 3000 orang. Diprediksikan 50 % dari mereka akan melanjutkan pendidikan pada Ma'had Aly Darul Munawarah. Ditambah lagi sebanyak 25% alumni Pondok Pesantren Darul Munawarah yang telah tamat Muadalah sebanyak 850 orang. Karena itu, cukup beralasan Ma'had Aly Darul Munawarah dicetuskan dan dikeluarkan izin penyelenggaraannya dan ditetapkan sebagai Dayah Tinggi atau Pogram Ma'had Aly.

Sebagai pendukung utama bagi penyiapan lulusan berkualitas, maka dibutuhkan kondisi sumber daya yang memadai dan mumpuni. Dari itu, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, Ma'had Aly Darul Munawarah telah memiliki sejumlah tenaga pengajar (dosen), baik yang berstatus sebagai dosen tetap, maupun tidak tetap. Dari sejumlah tenaga

pengajar tersebut, sebagian dari mereka adalah alumnus pondok pesantren Darul Munawwarah sendiri yang telah melanjutkan study di berbagai universitas dalam dan luar negeri. Di samping itu juga, sejumlah dosen lainnya dari berbagai lembaga pendidikan tinggi yang terdapat di Aceh telah menyatakan siap membantu mengajar di Ma'had Aly Darul Munawwarah.

Diantara mereka, ada yang berasal dari dosen tetap di IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, STAIN Malikul Shaleh Lhoekseumawe, STAIS al-Hilal Sigli, STAIS Al-Aziziyah Samalanga, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dan STAIN Al-Muslim Peusangan. Namun tenaga pengajar yang sudah tetap saat ini adalah 4 tenaga pengajar (dosen) yang berstatus doktoral (Dr), 4 orang tenaga pengajar berstatus Magister Agama (M.Ag), dan 24 alumnus sarjana strata satu (S1) dengan berbagai kedisiplinan Ilmu.

Dengan demikian Pondok Pesantren Darul Munawwarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dinilai mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kehendak pendidikan Tinggi karena telah memiliki tenaga pengajar yang berkualifikasi Magister dan Strata S.1. Keberlanjutan pogram Ma'had Aly pada Pesantren Darul Munawwarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam, sangat tergantung dari kesiapan dan sumber daya internal, partisipasi masyarakat sekitar serta *good will* pemerintah. Di lapangan teramati bahwa Sarjana Islam masih sangat dibutuhkan, hal ini terlihat dari jumlah Dinas atau instansi yang bersedia menjadi pendukung keberadaan Ma'had Aly sebagai pencetus ilmu agama. Berdasarkan kebutuhan di lapangan menunjukkan bahwa, pogram Makhad Aly pada Pondok Pesantren Darul Munawwarah masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Untuk menjamin output yang lebih baik, maka pogram Ma'had Aly terus membenah diri dalam berbagai aspek yang dibutuhkan dalam prosaes belajar mengajar, seperti pengayaan referensi, perluasan jaringan kerja sama dan penguatan manajmen pengelolaan. Peningkatan mutu pogram Ma'had Aly terus ditingkat persiapannya, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi global, tujuan peningkatan pogram studi dimaksud adalah sebagai jawaban yang sangat diharapkan dilapangan, yang tujuannya agar tercipta output yang dapat berkopetensi dengan berbagai instansi lain, juga berkelanjutan pogram Ma'had Aly pada Pesantren Darul Munawwarah sangat didukung oleh Instansi instansi atau pihak lain, hal ini terlihat dengan adanya perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Understanding*) atau MoU dengan pihak lain.

Ma'had Aly Darul Munawwarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya menetapkan kualifikasi kelulusan sebagai berikut:

1. Mampu menjadi tenaga ahli Agama Islam (Hukum Islam)
2. Mampu menjadi tenaga penyuluh Agama Islam (Hukum Islam)
3. Mampu menjadi tenaga pengelola lembaga perekonomian Islam.

Kualifikasi kelulusan di atas, mengacu kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, dalam Bab II Pasal 3 disebutkan: Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Beriman, Bertaqwa dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.
- b. Menguasai dasar dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu, mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahliannya.
- c. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan yang produktif dan pelayanan pada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- d. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya dibidang keahliannya maupun berkehidupan bersama di masyarakat.
- e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang merupakan keahliannya.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di program ma'had aly. Secara umum kurikulum yang digunakan di Ma'had Aly Darul Munawwarah adalah kurikulum terpadu antara model kurikulum dayah salafi dengan kurikulum lembaga pendidikan modern. Kurikulum terpadu tersebut terdiri dari kurikulum nasional sebagai standar nasional yang disusun oleh Dewan Ma'had Aly; dan kurikulum lokal yang disusun oleh pimpinan dan dewan pengurus Ma'had Aly Darul Munawwarah. Kurikulum ini diupayakan dapat mencerminkan program kaderisasi ulama untuk mencapai standar kompetensi yang berkualifikasi program ma'had aly.

Sistem perkuliahan Ma'had Aly Darul Munawwarah relevan dengan standar yang ditetapkan untuk sebuah program ma'had aly. Yaitu diselenggarakan dengan cara klasikal/kurikuler dan non klasikal/ ekstrakurikuler. Perkuliahan klasikal dilaksanakan dalam

bentuk tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri dengan memanfaatkan sumber dan media belajar. Perkuliahan non-klasikal dilaksanakan dalam bentuk stadium general, seminar, diskusi, jurnalistik, keorganisasian, dan lain-lain.

Rancangan dan implementasi kurikulum disesuaikan dengan visi, misi dan sasaran serta tujuan Program Studi, rancangan dan isi kurikulum disusun berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 353 tahun 2004 yang disempurnakan dan kurikulum lokal sebagai pengayaan, remediasi dan sebagai ciri kusus lembaga. Berdasarkan rancangan dan isi kurikulum tersebut, implementasinya dilengkapi dengan silabi mata pengajaran (Mata Kuliah) yang meliputi: Topik Inti, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sistem dan metode serta strategi Pembelajaran serta hasil kesepakatan antara pengasuh Mata Pelajaran (dosen) dengan para mahasiswa.

Ma'had Aly Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Lahan seluas	3 hektar
2. Ruang Kuliah	4 gedung
3. Ruang Seminar	1 ruang
4. Ruang perpustakaan	1 ruang
5. Ruang Administrasi	2 ruang
6. Laboratorium	-
7. Masjid/Mushalla	1 buah
8. Tempat Wudhuk	1 buah
9. Toilet/WC	2 buah
10.Meja dan Kursi	160 pasang
11.Papan Wite Board	5 lembar
12.Wereleess	1 unit
13.Oudio Visual (TV)	2 unit
14.Buku Perpustakaan	3750 examplar.
15.Laptop	1 unit
16.Projector	1 unit

Adapun tenaga administrasi yang aktif dan bertugas melayani bidang administrasi dayah dan Ma'had 'Alu di Dayah Darul Munawarah antara lain adalah;

1. Pustakawan	2 orang
---------------	---------

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 2. Tenaga Komputer     | 3 orang |
| 3. Tenaga Laboratorium | -       |

Dalam bidang kerja sama, Ma'had Aly Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya selalu mengadakan kerja sama dengan semua pihak, sehingga hampir semua kalangan mengenal secara luas. Baik dari komponen masyarakat Aceh bahkan dari luar Aceh. Karena, alumni dari Pondok pesantren Darul Munawarah telah banyak yang berhasil dan mengabdikan di tengah-tengah masyarakat, di samping juga bekerja di sejumlah kantor pemerintah hampir di seluruh pelosok Aceh dan bahkan di beberapa daerah di tanah air Indonesia. Dukungan terhadap keberadaan Ma'had Aly Darul Munawarah datang dari sejumlah dinas, badan dan kantor pemerintah yang ada di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Bahkan dari pemerintah Provinsi pun sangat mendukung keberadaan Ma'had Aly di Pesantren Darul Munawarah yang dipimpin oleh seorang Ulama Kharismatik yaitu Tgk.H.Usman Ali (Abu di Kuta Kreung).

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan beberapa argumentasi pendukung bahwa Pelaksanaan Program Ma'had Aly Pondok Pesantren Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat layak untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Program Ma'had Aly pada pondok pesantren tersebut.

Kekuatan Ma'had Aly Pondok Pesantren Darul Munawarah Desa Kuta Kreung Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang didukung oleh letaknya yang sangat strategis dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai, tersedianya para tenaga pengajar yang handal serta mahasantri yang cukup memadai. Namun kelemahan selama ini yang kami rasakan di pondok Pesantren Darul Munawarah adalah kurangnya sosialisasi dan promosi dalam bentuk publikasi melalui media cetak dan elektronika yang menyebabkan Program Pendidikan Ma'had Aly ini belum dikenal di kalangan masyarakat perkotaan. Promosi selama ini hanya mengandalkan promosi lisan dari mulut ke mulut alumni yang telah tersebar di berbagai wilayah dalam dan luar Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Pada lokasi penelitian yang keempat, yaitu di dayah Malikul Shalih Tanah Jambo Aye Panton Labu Aceh Utara ditemukan data sebagai berikut. Dalam wawancara dengan para guru senior di lingkungan dayah Malikul Shalih Tanah Jambo Aye Panton Labu Aceh Utara dijelaskan bahwa sebenarnya dayah ini telah lama menyelenggarakan program pendidikan ma'had 'aly, namun beberapa tahun kemudian sempat berhenti kegiatannya. Kemudian pada tahun 2017 yang lalu kegiatan ini mulai dilanjutkan khususnya setelah berhasil keluarnya SK

penyelenggaraan secara resmi dari Kementerian Agama di Jakarta. Dalam kesehariannya, Ma'had 'Aly dayah Malikul Shalih menerapkan jadwal belajar tiga kali dalam seminggu (sabtu, ahad dan senin). Guru dari dayah berupa santri senior (25 tahun sudah belajar di dayah). Santri MA dayah Malikul Shalih terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pendidikan sudah berjalan selama tiga tahun setelah sebelumnya sempat tidak aktif. Ummi (istri Abu Panton) sebagai pimpinan dayah dan beliau tidak mengajar di MA. Sedangkan Mudir (direktur) MA adalah alumni S2 Sudan, beliau tinggal di Sampoinet Aceh Utara. Guru MA terdiri dari luar dayah dan dari internal dayah. Para guru dimaksud adalah; Dr. Zuhdi alumni S1 Mesir, Dr. Hasbuh, S2 dan S3 PPS UIN Ar-Raniry, Dr. Tgk. Mahan, S1 UIN Ar-Raniry dan S2 dan S3 Universitas Khartoum Sudan, dan Prof. Manan, MS. Sementara itu tenaga pengajar lainnya adalah Tgk Ibdar, Tgk Zakaria, Tgk Muzakkir, Tgk Tarmizi dan Tgk Baihaqi (Baba) selaku wakil pimpinan dayah (wakil ummi), sedangkan Tgk Ibnu Hajar ditunjuk sebagai mudir (direktur) Ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih Tanah Luas Panton Labu Aceh Utara. Dayah ini sebelumnya dipimpin langsung oleh almarhun Abu Panton, Tgk H. Ibrahim Bardan yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Kini kepemimpinan dayah diserahkan kepada istrinya (ummi Panton).

Ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih dalam studinya mengambil konsentrasi (takhshus) Fiqih Muamalah. Dalam proses penerimaan mahasantri baru sejumlah materi ujian harus dilewati oleh calon mahasantri yang akan kuliah di Ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih Tanah Luas Panton Labu Aceh Utara ini, seperti bisa menghafal bab khutbah kitab Mahalli. Asal usul mahasantri tidak ada pembatasan, calon mahasantri boleh dari luar dayah Malikul Shalih tetapi dengan catatan telah atau sedang dalam proses belajar di tingkat (kelas) VII (kelas akhir dalam sistem pembelajaran di dayah tradisional). Sekarang perkembangan pendidikan harus mengikuti perkembangan sistem pendidikan di luar dayah. Jika dahulu (sistem tradisional) ijazah dan gelar tidak menjadi perhatian. Namun sekarang sangat dibutuhkan, hanya saja dayah harus memenuhinya sehingga alumnus dayah nanti bisa berkiprah di dunia yang lebih luas.

Saat ini jumlah mahasantri yang sedang studi pada Ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih Tanah Luas Panton Labu Aceh Utara adalah 52 orang, yang terdiri dari 43 mahasantri laki-laki dan 9 orang mahasantri perempuan. Menurut informasi dewan guru ma'had menyebutkan bahwa jumlah mahasantri perempuan sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 2 kelas, akan tetapi sekarang tinggal 1 kelas saja. Adapun materi kuliah takhashus merujuk kepada dua kitab fiqh klasik yang sangat populer, yaitu

kitab Mahalli dan Iyanah. Satu lagi keunikan ma'had 'aly Dayah Malikul Shalih adalah terdapatnya dua macam mahasiswa, yaitu mahasiswa reguler dan mahasiswa non-reguler. Mahasiswa reguler sistem perkuliahannya terjadwal sedemikian rupa sesuai dengan kalender akademik dan roster kuliah yang ditetapkan. Sedangkan mahasiswa non-reguler tatap muka kuliah hanya berlangsung 2 kali dalam sebulan. Hal ini disebabkan mahasiswa reguler adalah santri senior dan bahkan para guru santri Dayah yang mengajar di balai-balai kelas rendah, menengah dan bahkan kelas akhir di Dayah Salafiah ini. Sehingga mereka diberikan kekhususan dalam mengikuti kuliah di ma'had 'aly. Bahkan mahasiswa di kelas non-reguler merupakan guru pada kelas reguler.

Jadwal belajar (kuliah) mahasiswa reguler adalah bakda shalat shubuh sampai pukul 11.00 WIB, kemudian istirahat hingga datangnya waktu shalat dhuhur. Usai shalat dhuhur dan makan siang belajar lagi sampai waktu shalat ashar. Bakda shalat ashar hingga maghrib merupakan waktu istirahat. Kegiatan belajar dilanjutkan setelah shalat insya hingga pukul 11.00 malam. Sebenarnya pada awal pencetusan program pendidikan ma'had 'aly, perkuliahannya diprioritaskan untuk guru atau santri senior yang mendedikasikan hidupnya di Dayah, terutama guru yang masih berusia muda dan memiliki hasrat yang kuat untuk terus belajar hingga suatu saat ini bisa ke luar negeri. Khusus untuk program ma'had 'aly, mahasiswa harus membayar biaya perkuliahan sekitar Rp. 400.000,- per semester. Ma'had ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti perpustakaan, kantor mudir dan guru, asrama mahasiswa, ruang kuliah, kantor administrasi dan juga dilengkapi dengan koperasi santri. Sistem perkuliahan tidak ada pemisahan mahasiswa laki-laki dan perempuan, hanya saja di dalam kelas mereka duduk secara terpisah.

Sementara itu jadwal kuliah mahasiswa non-reguler adalah 3 sampai 4 kali pertemuan/tatap muka kelas saja selama satu semester. Belajar dilakukan pada malam hari mulai bakda shalat isya hingga larut malam pada tiap malam Kamis, Jum'at dan Sabtu. Dipilihnya waktu kuliah malam disebabkan pada siang hari mereka harus melaksanakan jadwal mengajar rutin pada kelas mahasiswa reguler ma'had 'aly yang kini sedang berada pada semester V. Dimana saat sekarang ini terdapat 310 orang mahasiswa, semuanya laki-laki, yang dibagi ke dalam 4 rombel. Karena itu untuk tahun ajaran ini (2019) ma'had 'aly akan kembali menerima calon mahasiswa perempuan sebanyak-banyaknya guna menutupi kekurangan mahasiswa perempuan yang akan dididik menjadi calon ulama nantinya. Mahasiswa semester III hanya satu rombel saja sekarang, dan juga tidak terdapat santri perempuan. Jadi pendidikan di ma'had 'Aly Dayah Malikul Shalih sudah berlangsung dua

tahun setelah penerimaan SK secara resmi dari Kementerian Agama RI di Jakarta (2017), dan sekarang sedang memasuki tahun ke-3.

Berdasarkan perolehan data di lapangan penelitian dapat dipahami bahwa mahasantri perempuan belum sepenuhnya mengisi dan berpartisipasi dalam program pendidikan tinggi keagamaan khusus dayah; Ma`had Aly (*dayah manyang*) di Aceh. Oleh karena itu, maka pendidikan keulamaan perempuan masih belum terpenuhi dan belum dapat terwujud secara maksimal kendati ditemukan sejumlah peluang dan kesempatan dan terbukanya kebijakan pimpinan dan pengurus dayah untuk menerima secara terbuka kehadiran calon mahasantri perempuan untuk studi pada dayah yang mereka pimpin. Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang diperkirakan menjadi penghambat lahirnya ulama perempuan dari dayah, dan ulama laki-laki yang membuka cakrawala keulamaan perempuan di dayah. Sehingga bisa dikatakan bahwa peluang gender mainstriming di lembaga dayah sedikit memberikan secercah harapan dibandingkan dengan era-era sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keulamaan perempuan di di level dayah manyang dapat dikatakan masih baru berada pada tahapan awal. Namun demikian, para pimpinan dan ulama pendidik di level dayah manyang sudah menunjukkan apresiasi yang positif terhadap semakin kondusif akan munculnya iklim keulamaan perempuan. Gejala positif ini ditandai dengan semakin berkembangnya peluang ke arah terbangunnya mindset di kalangan ulama dayah terhadap isu keadilan gender di dayah. Dimana pada akhirnya, peneliti menaruh kepercayaan penuh dan harapan besar terhadap semakin terbukanya peluang dan kesempatan bagi munculnya keulamaan perempuan pada dayah manyang khususnya di masa mendatang.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peluang dan tantangan keulamaan perempuan pada lembaga pendidikan Islam tradisional seumpama dayah (pesantren), khususnya pada jenjang program Ma`had 'Aly (*dayah manyang*). Sebagai jenjang pendidikan tinggi khas pesantren, dayah manyang dianggap memiliki atmosfir akademis yang lebih baik, lebih terbuka dan relatif memiliki pandangan yang lebih fair terhadap keadilan gender. Dimana keulamaan perempuan merupakan salah satu bentuk kepemihakan seseorang baik ia laki-laki maupun perempuan terhadap hak-hak kaum perempuan dalam upaya menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama. Jadi, keulamaan perempuan tidak mesti dilakukan oleh hanya kaum perempuan itu sendiri, melainkan juga oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu,

ma'had 'aly merupakan sebuah sub-sistem lembaga pendidikan dayah yang diharapkan bisa mewujudkan keulamaan perempuan ini di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan di empat dayah besar di pesisir Timur Aceh, dimana keempat dayah besar ini telah menyelenggarakan program pendidikan Ma'had 'Aly. Keempat dayah dimaksud adalah Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara di bawah pimpinan Tgk Sirajuddin. Kedua Dayah Malikul Shaleh Tanah Jambo Aye Panton Labu (Abu Panton), ketiga dayah Darul Munawarah Kuta Krueng Ulee Gle Bandar Dua Pidie Jaya di bawah pimpinan Abu Usman Kuta Krueng dan keempat Dayah MUDI Mesra Samalanga Kabupaten Bireun yang kini dipimpin oleh Abu Mudi (Waled Hasanul Basri).

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pendidikan keulamaan perempuan berlangsung di lembaga dayah khususnya pada program Ma'had Aly (*dayah manyang*). Bagaimanakah kepemihakan lembaga dayah dalam pengharusutamaan gender bagi santri perempuan sebagai calon ulama. Apa sajakah ragam bentuk peluang dan tantangan yang dialami santri perempuan dalam pendidikan keulamaan di lembaga dayah.

Senada dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pendidikan keulamaan perempuan yang berlangsung di lembaga pendidikan dayah khususnya pada program Ma'had Aly (*dayah manyang*) selama ini. Untuk mencermati kepemihakan ulama dan lembaga dayah dalam pengharusutamaan gender bagi santri perempuan sebagai calon ulama di masa mendatang. Untuk menemukan ragam bentuk peluang dan tantangan yang dialami perempuan dalam proses pendidikan keulamaan di lembaga pendidikan dayah.

Dasar pemikiran berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu dengan judul; *Mencari jejak Ulama Perempuan Pada Lembaga Pesantren Tradisional (Dayah) di Aceh* (2012). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ulama, persepsi yang terbangun dalam masyarakat adalah sosok laki-laki yang berpengetahuan agama hasil tempaan lembaga pendidikan Islam tradisional dan memiliki karisma (panutan) dalam masyarakat. Padahal, kualifikasi keulamaan memungkinkan pada siapapun, tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ulama. Tetapi dalam realitas sosial hal ini tidak mudah diwujudkan. Berbagai faktor, di antaranya sosio-kultural turut menghambat kaum perempuan berhasil menobatkan dirinya sebagai ulama layaknya kaum laki-laki. Kendati laki-laki dan perempuan sama-sama dilahirkan dari kombinasi yang serasi antara lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kurang polulernya ulama perempuan boleh jadi disebabkan oleh faktor bias gender yang masih kuat dalam masyarakat. Padahal,

secara kuantitas kaum perempuan telah memperoleh akses pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Tetapi, mengapa kaum perempuan masih relatif terbatas yang mencapai derajat keulamaan.

Di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Jamal D Rahman (1993;125), pesantren mempunyai peranan penting dalam upaya mewarisi dan mengembangkan warisan intelektual dan spiritual. Hal ini bisa dipahami, karena dilihat dari latar belakangnya, pesantren berperan sebagai lembaga transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pesantren berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan nilai-nilai agama melalui pendidikan, kegiatan masyarakat dan praktek ritual. Karena tradisi keilmuan di pesantren ataupun dayah mengalami dinamika tersendiri yang unik. Akan tetapi sebagaimana disinggung di atas, dayah atau pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tetap saja menyisakan satu persoalan besar, terutama berkenaan dengan *gender equality* khususnya dalam menjalankan fungsi keilmuannya untuk mendidik calon ulama perempuan.

Posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya adalah bahwa jika penelitian sebelumnya baru sekedar memetakan masalah di sekitar kaum perempuan dari satu sudut dan posisi ulama dari sudut yang berbeda menurut perspektif masing-masing, maka penelitian kali ini mencoba menyatukan keduanya dalam satu mindset yang "sekufu". Dimana kaum perempuan sebagai calon ulama baru harus berada di "sarangnya" ulama yang didominasi kaum laki-laki. Mungkin juga di tempat ini (dayah) yang notabene kental dengan auranya kaum laki-laki, para perempuan calon ulama itu akan merasa sebagai bagian dari pedopokannya juga. Beranjak dari persoalan inilah penelitian ini penting dilakukan guna memberi gambaran yang lebih jelas dan objektif terhadap proses pendidikan calon ulama perempuan pada lembaga dayah di Aceh pada era modern ini. Konon lagi menyangkut masalah pemerataan kesempatan serta penegakan keadilan atau keseimbangan kesempatan antara anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi calon ulama.

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan dan Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami. Berdasarkan amanat Undang-undang di atas,

Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan secara otonom.

Dayah adalah lembaga pendidikan pondok pesantren, dalam bentuk salafiyah, modern, dan Dayah Manyang atau Ma'had 'Aly. Sejarah masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dengan dunia Pendidikan Dayah yang sangat mangakar dan manyatu dalam kehidupannya. Menuntut ilmu di dayah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam tipikal masyarakat tradisional Aceh. Bagi masyarakat Aceh untuk mendalami ilmu-ilmu agama, dayah sebagai lembaga pendidikan menjadi pilihan masyarakat tradisional Aceh. Dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka ada yang mampu menjadi raja, menteri, panglima militer, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, kedokteran dan lain-lain.

Jalur pendidikan dayah di Aceh adalah pendidikan formal yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah Aceh, yayasan, badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pendidikan formal di dayah dapat dilakukan dengan tatap muka. Tahapan dalam pendidikan dayah dilaksanakan secara bertingkat dan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan thalabah/santri. Tingkat Pendidikan Dayah terdiri atas Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Ma'had Aly (*Dayah Manyang*). Pendidikan 'Ma'had Aly merupakan pendidikan dayah yang masa belajarnya empat tahun setelah pendidikan Aliyah. Pendidikan Ma'had Aly bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan Thalabah/santri yang islami, mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab serta mengamalkan al-Quran untuk melanjutkan ke tingkat Pendidikan Strata (S2) atau untuk memasuki pasar kerja. Lulusan Ma'had Aly harus mampu menghafal minimal 4 (empat) juz Aliyah serta mampu membaca dan memahami isi kitab mahalli dan/atau yang sederajat. Pendidikan Ma'had Aly berhak mengeluarkan ijazah Ma'had Aly oleh dayah yang bersangkutan.

Kurikulum Ma'had Aly (Dayah Manyang) memuat mata pelajaran: a. Hifdhil Qur'an : Hafal 15 juz dengan tajwid yang bagus; b. Fiqh : Fiqh thuhfah ibnu hajar al-haitami; c. Ulumul Hadits : Disesuaikan; d. Ulumul Qur'an; e. Usul Fiqh; f. Fiqh Sunnah; g. Fiqh al-Muqaran : Milal Wanihl Lisyarastani; h. Maqaashid Syari'ah : Muwafaqat; i. Fiqh al-Syafi'e; j. Tafsir Ayat Al Ahkam; k. Hadits Ahkam; l. Akhlak; m. Sirah Nabawiyah : Sirah Husain Haikal; n. Fiqh hadisthah : fiqh islami wa-adillatuhu (wahbah zuhaily) o. Sejarah Perundangan Islam; p. Bahasa Arab; q. Bahasa Inggris; r. Tamadun Islam; s. Qawaid Fiqhiyyah; t. Ilmu Manajemen; u. Ahwal Syakhshiah; v. Tauhid; w. Dakwah Islamiyah; x.

Ilmu Astronomi; y. Metode Penelitian; z. Ilmu Pengetahuan Alam;ã. Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun mata pelajaran umum disesuaikan dengan Kurikulum Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).

Pemerintah Aceh pada tahun 2012 sudah menetapkan delapan Dayah Manyang (*Ma'had 'Aly*) atau pesantren setingkat perguruan tinggi di beberapa daerah di Aceh. Diharapkan program pendidikan tinggi yang eksis di lembaga pendidikan dayah terus meningkat kualitasnya. Adapun sistem pendidikan Dayah Manyang sama dengan perguruan tinggi, dimana lulusannya bisa melanjutkan studi ke jenjang S2 ke universitas negeri karena ijazahnya sudah diakui. Hingga sekarang ini, terdapat delapan dayah di daerah Serambi Makkah ini sedang melangsungkan pendidikan Dayah Manyang. Dayah-dayah yang mulai melaksanakan program dayah manyang tersebut masing-masing; Darul Munawarah Kuta Krueng (Pidie Jaya), Dayah Mudi Mesra Samalanga (Bireuen), Dayah Malikussaleh Panton Labu (Aceh Utara), Dayah Darussalam Labuhan Haji (Abdya), Dayah Babussalam Meulaboh (Aceh Barat), dan Dayah Al Falah Abu Lam U (Aceh Besar). Dayah Manyang, diharapkan akan mampu menghasilkan para ulama setingkat strata 1 (S-1) sehingga mereka bisa menjadi tenaga pengajar dan dai di berbagai dayah lainnya. Peranan dayah di Aceh sebenarnya sangat strategis. Hanya saja, keberadaan lembaga pendidikan agama tersebut selama ini sering mengalami pasang surut. Saat ini, dayah sedang dihadapkan pada tantangan besar, terutama menyangkut masalah administrasi yang belum tertata baik, pengelolaan manajemen yang kurang profesional, dan masalah penguasaan teknologi informasi yang masih harus terus ditingkatkan.

Kata “perempuan”, dapat dipahami memiliki dua pemaknaan, biologis dan idiologis. Pemaknaan dari sisi biologis, seperti yang didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Secara idiologis, perempuan di sini bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini digunakan untuk membedakan kata “perempuan ulama” dari “ulama perempuan”. Yang pertama adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Sementara yang kedua adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Ulama perempuan bekerja, secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan

sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemaknaan “Ulama Perempuan” ini menyiratkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menegaskan dan memastikan, bahwa kiprah ulama, dengan ilmu yang dimilikinya, adalah untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subyek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Dalam proses panjang ini, identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan ulama sejak masa awal Islam sampai saat sekarang ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan.

Pada akhir proses panjang ini, diharapkan, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (akhlaq karimah), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil ‘alamin*). Takut atau takwa kepada Allah Swt tidak hanya untuk urusan laki-laki tetapi juga untuk urusan perempuan. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

## BAB LIMA

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Pesantren (Aceh: *dayah*) merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang *indigenous* (orisional) di Indonesia. Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia. Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan bagi umat Islam Indonesia yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang diselenggarakan pesantren menjadi salah satu subsistem pendidikan nasional. Sehingga pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah melembaga di Indonesia. Pesantren merupakan instrumen sistem pendidikan Indonesia yang unik, sebagai lembaga yang khusus melakukan kajian keagamaan (*tafaqquh fi al-din*), di samping itu pesantren tidak melepaskan diri dari lingkungan sosial. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama (*boarding*).

Akhir-akhir ini tidak sedikit pesantren tradisional di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan formal sebagai pendidikan plus. Disamping sebagai satuan pendidikan khusus keagamaan, pesantren juga dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya, meliputi: a. Pendidikan Diniyah Formal; b. Pendidikan Diniyah Nonformal; c. Pendidikan Umum; d. Pendidikan umum berciri khas Islam; e. Pendidikan Kejuruan; f. Pendidikan Kesetaraan; g. Pendidikan Mu'adalah; h. pendidikan tinggi (*ma'had`aly*) dan/atau; i. Program pendidikan lainnya (Pasal 19 PMA No 13 Tahun 2014). Subjek didik lulusan pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal (Pasal 18 PMA No 13 Tahun 2014).

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini, pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam. Beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan sangat menyulitkan masyarakat dalam implementasinya karena masyarakat memiliki keterbatasan nilai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dilihat dari proses perumusan, kebijakan tentang pesantren tersebut dirumuskan secara

sepihak oleh pemerintah sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai pihak yang memiliki power dan otoritas, Pemerintah telah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dalam mengatur pesantren pada umumnya di Indonesia. Dengan demikian, pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Walaupun demikian, pesantren di Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam sejak awal keberadaannya hingga dewasa ini. Sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang masih bisa *survive* sampai hari ini. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional Islam di kawasan dunia muslim lainnya akibat gelombang pembaharuan dan modernisasi yang semakin kencang telah menimbulkan perubahan-perubahan yang membawanya keluar dari eksistensi lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan karena karakter eksistensinya, yang dalam istilah Nurcholis Madjid disebut sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Pesantren mampu bertahan hingga sekarang ini bukan sekedar proses alami, tetapi pesantren memiliki elemen-elemen sub-kultur yang unik dan berciri khas bangsa Indonesia. Salah satu keunikan lembaga ini adalah independensinya yang kuat, bebas dari segala bentuk intervensi luar. Pada tingkat tertentu pesantren bisa menjadi salah satu contoh (*self-governing school*) sekolah yang otonom (swakelola).

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, pesantren dituntut memenuhi persyaratan minimal untuk disebut lembaga pendidikan ditandai dengan lengkapnya komponen-komponen pendidikan, yaitu; tujuan, pendidik, peserta didik, sistem pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Untuk memenuhi mutu setiap komponen pendidikan tersebut, diperlukan regulasi politik pendidikan yang berupa kebijakan pendidikan yang mengatur pendidikan pada pesantren. Agar pemenuhan standarisasi pesantren terlaksana dengan baik, diperlukan adanya kebijakan sebagai wujud politik pendidikan yang mengaturnya. Kekuatan ekonomi pesantren umumnya mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah, orang tua santri, dan masyarakat. Sumber biaya pesantren dari pemerintah sangat terbatas walaupun Kementerian Agama mempunyai struktur organisasi yang menangani pesantren di bawah Direktorat Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI, memiliki Kepala Bidang tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, dan memiliki Kasi (Kepala Seksi) Pesantren tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kecuali di Aceh, pemerintah Aceh melalui

Dinas Pendidikan Dayah menjadi lokomotif tambahan dalam pembinaan pendidikan di dayah.

Dewasa ini, arus globalisasi merajalela dapat merubah semua sistem kehidupan termasuk didalamnya sistem pendidikan dan tentunya berimbas terhadap sistem pendidikan pesantren. Respon pesantren berhadapan dengan modernisasi pendidikan, lebih banyak berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan transformasi kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan modern. Tetapi cenderung memperhatikan kebijaksanaan hati-hati, yaitu mereka menerima pembaharuan (modernisasi) tetapi hanya dalam skala terbatas. Sebatas mampu menjamin pesantren dapat bertahan. Sebagian besar pesantren menyikapi tantangan modernisasi pendidikan dengan melaksanakan berbagai perubahan berkaitan dengan sistem pendidikan dengan melaksanakan berbagai perubahan berkaitan dengan sistem pendidikan, kurikulum, materi, dan metode pembelajaran serta sistem evaluasi. Pesantren-pesantren inilah yang menyelenggarakan sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan dan kurikulum sesuai dengan yang ditentukan oleh departemen agama.

Tradisi keilmuan dan sistem pengajaran di kalangan masyarakat pesantren masih kental keyakinan bahwa ajaran-ajaran yang didukung oleh kitab-kitab salaf (kitab kuning), tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan sepanjang masa. Sistem pengajaran yang sangat terkenal diterapkan dalam proses pembelajaran di pondok pesantren adalah sistem sorogan dan wetonan dengan pendekatan gramatikal. Aktifitas belajar santri pun lebih di dominasi oleh kegiatan menghafal secara verbalisme terhadap teks-teks kitab tertentu dan arti kosa kata, serta hanya mendapatkan penerangan dari kiainya secara dogmatis.

Adapun fungsi pesantren di era modernisasi adalah pertama sebagai fungsi tarbiyah atau fungsi pendidikan. Ikhtiar yang dilakukan ialah tetap melaksanakan pendidikan kepesantrenan sekaligus mulai merintis pendidikan formal sebagai langkah awal untuk ikut memnuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan formal tanpa menghilangkan pendidikan keagamaan sejak dini pada anak-anak. Kedua, fungsi religius dimana pesantren tetap konsisten mengedukasi masyarakat dengan pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menjadikan masyarakat lebih religius memaknai status keagamaannya serta menjadikan pesantren sebagai pusat keagamaan di masyarakat sekitar. Ketiga sebagai fungsi sosial: salah satu fungsi sosial dari pesantren ialah mencetak ulama. Tidak semua individu yang belajar di pondok pesantren memiliki cita-cita menjadi seorang ulama, tidak jarang dari mereka yang masuk pondok pesantren justru dianggap anak atau individu yang bermasalah dilingkungannya.

## B. Saran-Saran

Posisi pasantren sebagai pusat lembaga yang berbasis ajaran Islam sejatinya pasantren memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya menjadi agen perubahan masyarakat, sehingga pasantren memiliki apresiasi yang tinggi di mata masyarakat. Dengan demikian Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin*, tidak anti terhadap perubahan dan perkembangan IPTEK. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan budaya masyarakat setempat (Aceh). Sehubungan dengan itu pasantren perlu melakukan penataan ulang, yakni perubahan pada bagian manajemen, kurikulum dan sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan dari penerapan IPTEK. Dengan adanya penyesuaian dan pembaharuan terhadap manajemen dan program pasantren dapat merespon kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang santrinya memiliki *akhlakul karimah*.

Pendidikan pasantren dalam menghadapi kemajuan dari penerapan IPTEK perlu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran Islam, agar tetap eksis dan relevan serta tidak terkena dampak perubahan sosial dan budaya. Untuk itu pasantren perlu memiliki program yang dapat menghadapi segala macam bentuk perubahan yang terjadi. Pendidikan pasantren tidak lagi melihat salafiyah dan khalafiyah (tradisional atau modern) tetapi keduanya satu kesatuan yang satu sama lainnya saling bersinergi membangun suatu peradaban yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan pasantren memiliki suatu nilai yang mampu menjadi *leading sector* dipelbagai sektor dalam pembangunan. Untuk dapat menjadi *leading sector* diperlukan suatu evaluasi terhadap kurikulum dan materi pendidikan pasantren yang dapat merespon sektor di berbagai kementerian teknis, baik dalam sektor industri, pertanian, kesehatan, kelautan, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, kehutanan, sumber daya alam, pemerintahan, pekerjaan umum, agama, perhubungan, perekonomian, UKM, pariwisata dan lain sebagainya.

Kementerian Agama segera perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan (sebagai produk politik) yang dapat mempercepat pemberdayaan dan pengembangan pesantren sehingga semakin berdaya, bermutu, dan layak untuk disebut lembaga pendidikan keagamaan. Institusi-institusi Islam (termasuk institusi pendidikan pesantren) diharapkan untuk memperkuat wawasan kekinian dan masa depan. Kemampuan dalam merespons tantangan perubahan dan tuntutan zaman harus sangat siap. Pesantren tidak sebatas mempertahankan hal-hal yang baik dari masa silam, dan harus membuka diri untuk mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Karena perkembangan sains dan teknologi,

penyebaran arus informasi, dan perjumpaan budaya dapat menggiring kecenderungan masyarakat untuk berpikir rasional, bersikap inklusif, dan berperilaku adaptif.

Pesantren dihadapkan pilihan-pilihan baru yang menarik dan cukup menggoda. Apalagi pilihan-pilihan tersebut dikemas dengan nuansa baru. Dan kondisi demikian ini tentu sangat berpengaruh terhadap standar kehidupan masyarakat. Pesantren harus responsif terhadap perubahan yang terjadi, tidak bisa bersikap isolatif dalam menghadapi tantangan perubahan. Respon yang positif adalah dengan memberikan alternatif yang berorientasi pada pemberdayaan santri dalam menghadapi era global yang membawa persoalan-persoalan makin kompleks. Respon yang tidak kondusif seperti isolatif ini akan menjadikan pesantren mengalami kelemahan dan kemunduran, yang pada gilirannya akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Pesantren juga dituntut memiliki beberapa kemampuan: Pertama, kemampuan untuk bertahan hidup di tengah perubahan dan persaingan yang terus bergulir. Kedua, kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dalam hal jasmaniyah maupun rohaniyah. Ketiga, kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Keempat, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kelima, kemampuan untuk memberikan sumbangan moral sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Adapun hal-hal yang perlu direkonstruksi dari sistem pendidikan pesantren salafiyah untuk mengajar ketertinggalan dan menghadapi tuntutan perubahan di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi adalah sebagai berikut:

Pola kepemimpinan: sejalan dengan tuntutan perubahan zaman, pesantren perlu melakukan pembaharuan dengan mengubah paradigma kepemimpinan dari kharismatik ke rasionalistik dan dari otoriter -paternalistik ke diplomatik-partisipatif. Tipe pemimpin yang dibutuhkan saat ini di pesantren adalah pemimpin transformatif dan responsif yang tanggap terhadap segala kebutuhan santri, komunitas santri dan masyarakat pada umumnya. Pemimpin pesantren yang transformatif dan responsif akan selalu berpegang kepada prinsip bahwa pesantren merupakan lembaga untuk memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren yakni santri, wali santri, dan masyarakat luas. Pemimpin pesantren yang transformatif akan senantiasa terbuka terhadap gagasan-gagasan inovatif dan reformatif dan selalu ikhlas menampung aspirasi dan harapan masyarakat untuk kemajuan lembaganya.

Struktur Kurikulum: sistem kurikulum pesantren salafiyah telah mengalami penyempitan orientasi. Pada umumnya pembagian keahlian di lingkungan pesantren hanya berkisar pada kitab aqaid, fiqh, tasawuf, nahwu-sharaf, tafsir, dan hadits. Untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan santri dan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan pembaharuan dalam struktur kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum pesantren harus didahului dengan kegiatan kajian kebutuhan secara akurat agar pendidikan pesantren didahului dengan kegiatan kajian kebutuhan secara akurat agar pendidikan pesantren lebih fungsional. Pelaksanaan kurikulum hendaklah menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk dan pembelajaran kontekstual. Sedangkan penilaiannya harus menyeluruh terhadap semua kompetensi santri, mencakup kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan mental.

Oleh karena itu ditegaskan bahwa yang terpenting pesantren dapat bermanfaat bagi santri dan masyarakat sekitar, menjadi seorang individu yang shaleh dan memiliki kepribadian ikhlas dalam menjalankan ibadah. Kebijakan yang dilakukan oleh pondok pesantren salafiyah ketika dihadapkan kepada keinginan untuk melestarikan tradisionalisme dan keharusan modernisasi adalah: a) Sistem pengajaran tradisional seperti bandongan dan sorogan berjalan diluar sistem klasikal. b) Kitab kuning tetap digunakan sebagai rujukan materi-materi keislaman di madrasah. c) Madrasah tersebut memiliki kurikulum hasil kombinasi kurikulum kementerian agama dan kepesantrenan. d) Guru kitab kuning diupayakan dari golongan ulama, guru keagamaan non kitab kuning. Sedangkan tenaga pengajar pelajaran umum dikalangan guru profesional lainnya. e) Bersikap terbuka terhadap kebijakan negara (politik, pendidikan). f) Mengupayakan kultur pondok pesantren dalam hubungan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. IV. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1988.
- Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2006.
- Agusni Yahya, *Doktrin Islam dan Studi Kawasan; Potret Keberagamaan Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
- Amin Haedari, *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*. Jakarta: Lekdis & Media Nusantara, 2006.
- Amin Haedari dan Abdullah Hanif, (ed.), *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004.
- , *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan dan Sosial*, Jakarta: LeKDiS & Media Nusantara, 2006.
- Ardinansyah, A., Tenrisau, D., Aslim, F., & Wekke, I. S. *Ketidakjujuran Akademik Dalam Pendidikan Tinggi*. 21 July 2018.
- Arifin, S. Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial dalam Islam Perspektif Kuntowijoyo. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(2), 477-507, 2014.
- Azhar M. Nur, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dayah*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2011.
- Azyumardi Azra, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan: 1994.
- Azyumardi Azra, "Pendidikan Pesantren dan Tantangan Global: Perspektif Sosio-Historis", *Jurnal Mihrab*, Vol. 2, No. 2, Depag: PD Pontren, 2007.
- Baihaqi AK., "Ulama dan Madrasah di Aceh", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali 1983.
- Buchori, M. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta:Tiara Wacana 1994.
- Danielle Crittende, *Wanita Salah Langkah; Menggugat Mitos Kebebasan Wanita Modern*, terj. Sofia Mansor, Bandung: Qanita, 2002.
- Daulay, H. P. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2014.
- Fahkri M. Yacob, dkk., *Reproduksi Ulama Perempuan di Dayah Aceh*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Fadjar, A. M., Zumar, D., & Dja'far, S. F. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Fajar Dunia, 1999.
- Fuaduddin, B. *Pendidikan Agama Islam, Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, editor Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (Vol. 2002). Jakarta: Logos, 2002.
- H. A. R. Tilaar, (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. IndonesiaTera, 1998.
- Halim Tosa, A., *Dayah dan Pembaharuan Hukum Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 1989.
- Hamfan Andi., "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No.1, Juni 2013, p. 177-202, 2013.

- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang, 1975.
- Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi atas Pemikiran KH. Abdullah Syafi'ie dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Padamadani, 2003.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Iskandar, "Profil Ulama Tradisional", *Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Pusat penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Unsyiah, 1998.
- Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah" dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali 1983.
- Jamal D Rahman, "Distorsi Khazanah Kultural Pesantren", dalam A. Naufal Ramzy (ed), *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Jakarta: Deviri Ganan, 1993.
- Kuntowijoyo, *Budaya & Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1999.
- Luthfi Auni, dkk., (ed.) *Eksiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- M. Ikhsan, Sabri, & Wekke, I. S. *Pengalaman Paramadina sebagai Rumah Pengetahuan Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan, Tradisi Hikmah, dan Ilmu Pengetahuan*. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 8(2), 373-405, 2018.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Muhaimin, M. A. *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mulyono, M., & Wekke, I. S. *Academic and Culture Development Strategy Management for Islamic Higher Education In Indonesian*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (Vol. 175, No. 1, p.012163). IOP Publishing, 2018.
- Mulyono, M., & Wekke, I. S. *Religious and Academic Cultural in Technology Development on Islamic Higher Education of Indonesia*. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 119(18), 1093-1105, 2018.
- Mulyono, M., & Wekke, I. S., *Strategi Pembelajaran di Abad Digital*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2018.
- Muslim Zainuddin, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- M Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah; Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhoekseumawe: Nadia Foundation, 2003.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistansi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren*. Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Queiroz, L. R. S., & Figueiredo, S. "The World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century" and Perspectives for Music Education in Brazil. International Perspectives on Research in Music Education, 205, 2016.
- Sri Haningsih, "Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia" dalam *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2008.
- Sri Suyanta, "Peran Ulama Aceh di Era Reformasi", *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

- Teuku Ibrahim Alfian, *The Ulama in Acehnese Society: A Preliminary Observation*, Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu Sosial Aceh, 1975.
- W Iryana, Tantangan Pesantren Salaf di Era Modern. *Al-Murabbi*, 2(1).  
Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas dan Fungsi Pesantren di Era Modern. *Sosietas*, 7(1), Juli 2015.
- Yusny Saby, "Islam and Social Change: The Role of 'Ulama' in Achenese Society", *Dissertation*, Amerika: Temple Universiry, 1995.
- , "Pesantren Unggul dan Calon Ulama: Tantangan Dalam Menghadapi Era Globalisasi" *Sinar Darussalam*, No. 222, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah, 1998.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Muhibuddin, M.Ag</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Penata Tk. I (III/d)/Lektor
4.	NIP	197008062000031002
5.	NIDN	2008067001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	2200806700108143
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ulee Gle, 08 Juni 1970
8.	E-mail	muhibuddin.hanafiah@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360116100
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-Raniry No. 5 Kopelma Darussalam
11.	Bidang Ilmu	Metodologi Studi Islam
12.	Program Studi	Prodi Teknik Lingkungan
13.	Fakultas	Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry	UIN Syahida
2.	Kota dan Negara PT	BandaAceh	BandaAceh	Jakarta
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Pemikiran Pendidikan Islam
4.	Tahun Lulus	1994	2001	Belum selesai

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2015	Nasionalisme Ulama Aceh dan Penangkalan Paham Radikal di Kalangan Santri Dayah Tradisional <i>(Studi Internalisasi Wawasan Kebangsaan Pada Lembaga Pendidikan Non-Formal di Aceh)</i> .	Bantuan Penelitian Kompetitif Kolektif Diktis Kemenag RI
2.	2016	<i>Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja di Malam Hari Pada Fasilitas Umum di Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.</i>	Bantuan Dana Penelitian DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3.	2017	<i>Resistensi Masyarakat Aceh Dalam Menangkal Bangkitnya Ideologi Komunis; Peran OKP Dalam Bela Negara di Kota Langsa.</i>	Bantuan Dana Penelitian DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4.	2018	Anomali Perempuan Pengemis di Negeri Syariat; Studi Gender Tentang Benturan Antara Kearifan Lokal dan Permasalahan Sosial Masyarakat Aceh Kontemporer	DIPA UIN Ar-Raniry 2018
5.	2019	Pendidikan Keulamaan Perempuan pada Dayah Manyang (Ma'had `Aly) di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2016	Pengurus FPK Kesbangpol dan Linmas Aceh	APBA
2.	2017	Pengurus DPW-BKPRMI Aceh	APBA
3.	2018	Pengurus BKM Babul Muttaqin Gampoeng Lamkueueng	ADG
dst.			

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Gagasan Pengembangan FTK IAIN Ar-Raniry	Jurnal Mudarrisuna Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Vol. 2, No.1 Edisi Jan-Jun 2013
2.	Dayah, Ulama Perempuan dan Modernisasi Pendidikan di Aceh	Jurnal Inovasi el-Fathiya Institute Banda Aceh	Vol. 1, No.2, Tahun 2014
3.	Kontekstualisasi PAI Dalam Kurikulum 2013	Jurnal Inovasi el-Fathiya Institute Banda Aceh	Vol. 2, No.1, Tahun 2015
4.	Nasionalisme Ulama Untuk Penangkalan Paham Radikal di Kalangan Santri Dayah Tradisional di Aceh	Jurnal Kalam LSAMA Banda Aceh	Vol. 1, No.3, Tahun 2015
5.	Penerapan Media CD Dalam Pembelajaran Tajwid; PTK di MTsN Rukoh Banda Aceh	Jurnal At-Tarbawy STAIN Zawiyah Langsa	Vol. 2, No.1, Edisi Juli-Des 2015

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Internalisasi Nilai Teologis Dalam Pendidikan Islam	2009	100	Ar-Raniry Press
2.	Khazanah Pendidikan Islam Indonesia	2012	315	Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh
3.	Esay-Esay Pendidikan dan Keislaman	2013	400	Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh
4.	Mengorbit Ulama Perempuan Aceh	2014	350	Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh
5.	Yusny Saby Sang Motivator	2016	500	LSAMA Banda Aceh

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Anomali Perempuan Pengemis di Negeri Syari`at; Studi Gender Tentang Benturan Antara Kearifan Lokal dan Permasalahan Sosial Masyarakat Aceh Kontemporer	2018	Laporan Penelitian	EC00201853126
dst.	-	-		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Ketua Peneliti,

**Muhibuddin, M.Ag**  
NIDN. 2008067001